

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Taktik Jitu Hadapi Gelombang Omicron



Edisi 38
Februari 2022



TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Tangkal Omicron: Tancap Gas Sukseskan Presidensi G20 Indonesia 2022

Pembaca Majalah Kominfo Next yang berbahagia. Semoga Anda sekalian selalu sehat. Sepanjang tahun 2022, Indonesia mendapatkan amanah dan kepercayaan negara-negara Group of Twenty atau G20 sebagai tuan rumah penyelenggaraan G20 tahun 2022. Mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*", Indonesia tancap gas sebagai tuan rumah pada saat Riyadh Summit 2020 dan secara penuh memegang Presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 di Kota Roma, Italia.

Kick off atau dimulainya forum kerja sama multilateral antara 19 negara dan Uni Eropa itu pada tanggal 1 Desember 2021 dan akan berlangsung hingga akhir tahun nanti. Mengenai apa saja tujuan dan kepentingan Indonesia yang dibawakan dalam forum tersebut, akan diulas dan

dikemas pada Majalah Kominfo Next edisi ini. Namun tentunya, selama Presidensi G20 Indonesia berlangsung perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Di samping semangat kegotongroyongan dan kerja kolaborasi yang kuat untuk membawa isu-isu prioritas Indonesia ke tingkat global, kita juga sedang dihadapkan pada tantangan peningkatan jumlah kasus pandemi Covid-19, khususnya pada varian Omicron.

Presiden Joko Widodo menginginkan momentum Presidensi G20 Indonesia berjalan dengan baik. Mengingat para pejabat tinggi dari negara-negara Anggota G20 dan secara umum masyarakat dunia akan menyaksikan kepiawaian Indonesia dalam menyukseskan Presidensi G20 2022. Pada prinsipnya, tangkal varian Omicron menjadi perhatian serius Presiden Jokowi.

Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**



Kepala Negara telah memberikan arahan, kebijakan dan strategi yang terukur kepada seluruh kementerian dan lembaga, khususnya yang diberikan mandat menangani pandemi Covid-19 untuk bekerja secara bersungguh-sungguh. Fokus dan tujuannya menangkal wabah varian Omicron agar memastikan setiap kegiatan atau forum-forum Presidensi G20 Indonesia berjalan dengan baik.

Kontribusi Indonesia kepada dunia akan terjawab melalui forum G20. Karena sebagai tuan rumah, Indonesia mengakomodir kepentingan, pikiran, ide serta gagasan Anggota G20 dalam menjawab krisis pandemi yang telah menggerus hampir semua sektor kehidupan manusia, terutama kesehatan dan ekonomi.

Presidensi G20 Indonesia membahas dua arus isu utama. Pertama, *Finance Track*. Forum ini dihadiri Menteri Keuangan hingga Gubernur Bank Sentral dari masing-masing Anggota G20. Kedua, *Sherpa Track* yang membahas isu multi sektor. *Sherpa Track* dibagi dalam tiga jenis pertemuan; *working group*, *engagement group* dan pertemuan tingkat menteri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mengambil peran penting dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Di bawah kepemimpinan Menkominfo Johnny G. Plate, Kementerian Kominfo akan mengawal isu sektor digital. Ulasannya tersaji pada edisi kali ini.

Kementerian Kominfo telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan Presidensi G20 Indonesia pada isu digital melalui Digital Economy Working Group (DEWG). Selain itu, pemerintah akan membentuk Tim Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia dan Menkominfo Johnny G. Plate berperan sebagai Koordinator Komunikasi Publik.

Tim Komunikasi Publik Presidensi G20 juga melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Kami mengajak para pembaca untuk terus mengikuti setiap kegiatan Presidensi G20 Indonesia 2022. Lebih lanjut, untuk mengetahui sejarah berdirinya G20, peran Negara Anggota G20 dalam menjawab krisis global hingga secara khusus mengenai penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Silakan unduh buku digital atau e-book G20pedia yang diluncurkan Kementerian Kominfo melalui kanal linktr.ee/g20pedia.

Mari kita sukseskan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan tetap kawal isu digital melalui forum DEWG Kementerian Kominfo untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju!

Di samping semangat kegotong-royongan dan kerja kolaborasi yang kuat untuk membawa isu-isu prioritas Indonesia ke tingkat global, kita juga sedang dihadapkan pada tantangan peningkatan jumlah kasus pandemi Covid-19, khususnya pada varian Omicron.

Daftar Isi

6 Teknologi & Gadget

10 Kominfopedia

14 Kabar Istana

24 Liputan Utama

42 Jurnal Foto

46 Gagasan

50 Opini

54 #MakinTahuG20

56 Liputan Khusus

74 Portal Kominfo

84 #KisahdiKominfo

86 Lintas Kominfo

MYTH & FACTS OMICRON



OMICRON



MINFO SERIES

THE MYTHS & FACTS

The Myths & Facts of Omicron

2022 | Tua & Muda | Sedang diperangi bersama

Episodes

- 1. Mitos: Omicron hanya menimbulkan gejala ringan.**
Fakta: Meskipun penyebarannya lebih cepat, gejala Omicron tidak separah varian Delta. Tapi, bagi lansia, orang dengan komorbid dan orang yang belum divaksinasi tetap berpotensi kematian.
- 2. Mitos: Vaksin tak mampu lumpuhkan Omicron.**
Fakta: Vaksin menjadi proteksi terbaik melawan Omicron. Data menunjukkan 60% pasien Omicron di Indonesia yang meninggal dunia belum pernah divaksinasi.
- 3. Mitos: Orang yang belum divaksinasi tidak akan bergejala parah akibat Omicron.**
Fakta: Orang yang belum divaksinasi justru yang paling rentan tertular Omicron. Pasien Omicron di rumah sakit kebanyakan adalah yang belum vaksin.
- 4. Mitos: Omicron tidak bisa menginfeksi orang yang sebelumnya terkena COVID-19.**
Fakta: Orang yang pernah positif COVID-19 juga bisa terkena Omicron. Vaksin sangat dianjurkan untuk menghindari gejala parah.
- 5. Mitos: Penggunaan masker tak bisa cegah penularan Omicron.**
Fakta: Pencegahan terbaik dari tertular Omicron adalah disiplin protokol kesehatan, termasuk memakai masker, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas, serta vaksinasi.



1. Kamera

Peralatan ini memiliki fungsi untuk menangkap momen maupun cerita ke dalam sebuah *frame* gambar (foto). Tentunya, pendekatan yang digunakan wartawan dalam mengambil *angle* sebuah gambar, akan berbeda dengan fotografer produk *fashion* ataupun pernikahan. Kamera yang digunakan lebih fleksibel, bahkan terkadang tidak *sophisticated* layaknya peralatan yang sering dipakai oleh fotografer event olahraga.

Mulai dari kamera DSLR, *mirrorless*, bahkan kamera saku, bisa menjadi peralatan wartawan dalam mengabadikan suatu moment dan menangkap cerita di dalamnya. Betapa pentingnya kamera bagi seorang wartawan, tergambar dalam suatu *scene* di film Spiderman 3. Ketika itu Spiderman sedang beraksi melawan musuh bebuyutannya. Jonah Jameson, bos Peter Parker di perusahaan media yang kebetulan berada di lokasi pertempuran, tidak ingin kehilangan momen tersebut. Jonah yang tidak membawa kamera dan tidak ada stafnya seorangpun di lokasi, mau tidak mau, bernegosiasi dengan anak kecil untuk bisa membeli kamera pocketnya demi menangkap momen tersebut.

Dengan ukuran yang makin kecil dan tingkat kepraktisan yang semakin baik, kamera menjadi peralatan wajib yang dibawa oleh wartawan dalam bertugas. Selain tentunya wartawan akan melakukan pencatatan sebagai bahan tulisannya, hadirnya kamera bisa memberikan informasi lebih dari *angle* yang mungkin sulit untuk dideskripsikan dalam bentuk tulisan. Sehingga, hasil karyanya akan semakin informatif dan menarik untuk dinikmati pembacanya.



2. Voice Recorder

Alat mungil ini berfungsi untuk merekam suara yang berisi pernyataan dari narasumber ataupun pembicara yang menjadi subjek berita atau kisah yang akan dilaporkan wartawan. Selain wartawan akan mencatat pernyataan yang disampaikan oleh pembicara, hadirnya rekaman suara akan membantu wartawan dalam meningkatkan keakuratan informasi bahkan mendapatkan informasi lain yang tidak sempat dicatatnya. Sehingga, peran *voice recorder* menjadi penting sebagai *quality control* dan alat untuk memastikan kualitas informasi dalam tulisan yang dibuat seorang wartawan.

Saat ini, *voice recorder* sudah hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari yang berukuran telapak tangan, hingga hanya sebesar jari. Tentunya, perubahan ukuran ini juga diiringi peningkatan fitur dan kualitas hasil rekaman yang semakin bagus.



3. Mesin Ketik

Alat ini telah menemani tugas wartawan dalam menuliskan produk-produk jurnalistik selama puluhan tahun, mulai dari era Perang Dunia II, hingga saat mulai mewabahnya *personal computer* (PC) di awal millennium ke-2. Dari sisi kepraktisan, tentu saja mesin ketik ini jauh dari fungsi maupun performa yang ditawarkan komputer. Namun tidak dipungkiri, mesin ketik telah menjadi alat yang selalu ada dan membantu tugas wartawan di masanya.

Seperti peralatan lainnya, mesin ketik juga mengalami evolusi. Dimulai dari mesin ketik *full* mekanik dengan bunyi khasnya, hingga mesin ketik elektrik dengan *keyboard* yang lebih senyap. Di era yang serba digital seperti saat ini, mesin ketik sudah sangat jarang ditemui di kantor-kantor pemberitaan. Namun perannya dalam turut mendukung dunia pers, telah tercatat dan mendapat tempat tersendiri.



4. Laptop

Setelah era PC, satu dasawarsa awal millennium ke-2, dunia disuguhi perangkat yang memiliki prinsip kerja sama dengan PC, namun lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Perangkat ini dikenal dengan laptop/*notebook*/komputer jinjing. Komputer jinjing merujuk pada penggunaannya yang mudah untuk dijinjing atau dibawa kemana-mana. Didukung dengan bentuk dan beratnya yang hanya 1-6 kg, alat ini seketika menjadi pengganti PC. Dengan pola kerja wartawan yang dituntut untuk selalu *mobile*, perangkat ini sangat tepat untuk mendukung pekerjaan para pewarta.

Hadirnya laptop, telah memungkinkan wartawan untuk semakin cepat dalam mengirimkan berita ke meja redaksi. Ketika bertugas dalam suatu acara, wartawan bisa langsung mengolah bahan-bahan yang tersedia untuk menjadi berita. Waktu untuk pemrosesan semakin sedikit dan produktivitas wartawan juga meningkat. Bayangkan jika masih harus bekerja dengan PC, wartawan masih harus menempuh perjalanan dari lokasi acara ke kantornya untuk bisa mengolah berita yang tentunya membutuhkan waktu dan usaha lebih.



5. Smartphone

Perkembangan pengguna telepon genggam/ponsel yang saat ini telah menjelma menjadi *smartphone*, terasa sangat signifikan. Tak terkecuali profesi wartawan, perangkat ini telah menjadi gawai wajib bagi wartawan ketika bertugas. Selain tentunya berfungsi sebagai alat komunikasi, dengan fitur-fitur yang dihadirkan saat ini, *smartphone* telah menjadi satu perangkat *all-in-one* bagi seorang wartawan.

Fungsi untuk menghasilkan gambar foto, sudah bisa ditangani perangkat ini dengan *built-in* kamera yang saat ini kualitasnya sudah hampir setara dengan kamera profesional. Kebutuhan untuk merekam suara juga sudah bisa dipenuhi oleh perangkat ini. Serta tentunya fungsi untuk menuliskan naskah dengan aplikasi *word processing*, sudah bisa dilakukan *smartphone* yang beredar di pasaran saat ini.



Halo SobatKom! Kominfopedia edisi kali ini akan membahas seluk beluk dan karakteristik varian Omicron, varian baru dari Covid-19 yang tengah menjangkiti sebagian besar masyarakat dunia sejak akhir Tahun 2021 lalu.

Varian B.1.1.529 atau Omicron merupakan varian baru yang disebut memiliki karakteristik yang sangat cepat dalam menularkan virus. Menurut World Health Organisation (WHO), Omicron pertama kali dilaporkan dari Afrika Selatan pada 24 November 2021. Varian ini dideteksi dari spesimen yang diambil pada 11 November di Botswana, dan 14 November di Afrika Selatan.

Dua hari setelah dilaporkan, tepatnya di tanggal 26 November 2021, WHO menetapkan Omicron sebagai Variant of Concern (VOC), yang artinya dapat menyebabkan peningkatan penularan serta tingkat kematian, dan bahkan dapat mempengaruhi efektivitas vaksin. Bukti awal menunjukkan adanya peningkatan risiko infeksi ulang pada varian Omicron, dibandingkan dengan varian lainnya. Sebelum munculnya varian Omicron, WHO telah menetapkan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta sebagai VOC.

Omicron

Para ilmuwan berhasil mengidentifikasi Omicron karena kombinasinya yang khas antara lebih dari 50 mutasi. Sebagian berasal dari varian awal seperti Alpha dan Beta yang berdasarkan penelitian menunjukkan kemampuan penyebaran yang sangat cepat. Sebagian lainnya berasal dari mutasi virus corona yang diketahui dapat mengelak dari antibodi yang dihasilkan vaksin.



Dikutip dari health.europa.eu, ilmuwan hingga saat ini masih terus meneliti asal perantara antara varian sebelumnya hingga menjadi bentuk Omicron saat ini. Teori umum yang beredar adalah Omicron menginfeksi tikus dan bermutasi di antara kawanannya, hingga akhirnya kembali tertular ke manusia.

Hasil studi ini diungkapkan oleh Profesor Jianguo Xu, pimpinan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) China. Penelitiannya berfokus pada jumlah rata-rata mutasi pada kelima VOC dan kunci mutasi dari protein S. Profil mutasi pada Omicron menunjukkan bahwa virus telah beradaptasi untuk menginfeksi sel-sel tikus, dan perlahan bermutasi terus menerus hingga akhirnya kembali ditularkan ke manusia lewat proses *reverse zoonotic*.

Lalu kapan sebenarnya varian **Omicron** masuk ke Indonesia?



Dikutip dari covid19.go.id, kasus varian Omicron pertama kali terdeteksi tanggal 16 Desember 2021 pada N yang berprofesi sebagai petugas kebersihan RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Namun karena diketahui N tidak bepergian ke luar negeri, pelacakan kontak (*contact tracing*) juga dilakukan terhadap 169 WNI dari luar negeri yang sedang karantina di lokasi pada periode 24 November hingga 3 Desember 2021.

Berdasarkan pelacakan kontak tersebut, ditemukan bahwa kemungkinan besar kasus pertama Omicron berasal dari seorang warga negara Indonesia berinisial TF yang tiba dari Nigeria pada 27 November 2021 dan karantina di Wisma Atlet. Saat pelacakan dilakukan, hasil tes PCR untuk TF sudah dinyatakan negatif.

Berikut beberapa karakteristik penularan dan gejala yang disebabkan oleh varian Omicron, dikutip dari situs cdc.gov milik Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat:

Tingkat penularan

Varian Omicron lebih mudah menyebar dibanding virus asli penyebab Covid-19 serta dibanding varian Delta. CDC menilai siapapun yang terinfeksi varian Omicron akan dengan mudah menularkannya ke orang lain, baik mereka yang sudah divaksinasi ataupun tidak memiliki gejala.

Gejala

Gejala yang ditunjukkan oleh orang yang terinfeksi Omicron tergolong mirip dengan varian-varian sebelumnya. Namun tingkat parahnya gejala sangat beragam tergantung pada apakah penderita telah divaksinasi, kondisi penyakit bawaan, usia, hingga riwayat infeksi Covid-19 sebelumnya.

Infeksi berat

Data menunjukkan infeksi Omicron tidak separah infeksi yang disebabkan varian sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan adanya gejala yang lebih berat dan butuh penanganan medis di rumah sakit hingga berpotensi kematian, terutama bagi kelompok rentan dengan penyakit bawaan tertentu. Karenanya jangan lengah dan tetap jaga protokol kesehatan ya Sobatkom.



Mengapa virus bermutasi?

Munculnya berbagai varian Covid-19 sejak Alpha, Beta, Gamma, Delta, hingga Omicron merupakan suatu hal yang wajar, mengingat karakteristik virus yang akan terus bermutasi. Virus menduplikasi dirinya sendiri untuk bereproduksi, namun proses ini tidak selalu sempurna sesuai cetak biru secara genetik, sehingga menghasilkan versi baru dari virus tersebut, yang disebut dengan varian.

WHO mengingatkan, semakin luas penyebaran virus ini, ia akan terus menduplikasi dirinya di dalam tubuh penderita, maka semakin besar peluang ia bermutasi menghasilkan varian baru. Terlebih lagi masih belum bisa diprediksi apakah varian baru setelah Omicron akan jauh lebih ringan atau justru berdampak pada penurunan kekebalan tubuh. Oleh karenanya sangat penting untuk mencegah penyebaran, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tentunya vaksinasi. Vaksin membantu memutus penularan, serta melindungi kita dari infeksi berat akibat virus ini.

Sumber :

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html>

<https://www.bbc.com/news/health-55659820>

<https://www.healtheuropa.eu/omicron-variant-potentially-originated-from-mice/113034/>

<https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/ini-asal-muasal-kasus-varian-omicron-pertama-di-indonesia>

<https://covid19.go.id/p/berita/penjelasan-who-tentang-omicron-varian-baru-covid-19>



Saksikan #KOMINFOPEDIA pada kanal Kemkominfo TV



Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 9 Februari 2022. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Presiden Jokowi: Pers Adalah Lokomotif Kemajuan Bangsa

Pemerintah saat ini terus bekerja keras melakukan transformasi struktural guna menghadapi era yang penuh kompetisi. Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja yang luas.

"Ini sangat penting sehingga memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, dan juga menyerap pengangguran yang ada," ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional, dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 9 Februari 2022.

Dalam melakukan transformasi tersebut, Presiden pun meminta dukungan para insan pers Indonesia. Presiden meyakini bahwa pers Indonesia merupakan lokomotif kemajuan bangsa yang dapat mendorong bangsa dan negara percaya diri dalam mewujudkan Indonesia maju.

"Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita serta menjadikan masyarakat bangsa dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju," tambahnya.

Presiden menjelaskan, transformasi besar dalam berbagai sektor terus dilakukan pemerintah. Misalnya dalam pembangunan sumber daya manusia, pemerintah terus melakukan perubahan mulai dari perbaikan

layanan kesehatan hingga revitalisasi pelatihan vokasional guna meningkatkan keahlian para tenaga kerja Indonesia.

Terkait peningkatan nilai tambah, Presiden kembali menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melakukan hilirisasi, baik di sektor industri tambang maupun sektor pertanian. Kepala Negara menginginkan Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari barang yang diproduksi di Tanah Air.

"Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi maka akan tercipta lapangan kerja baru yang makin banyak dan nilai tambahnya akan berdampak pada industri-industri nasional kita," lanjutnya.

Penguatan nilai tambah, lanjut Presiden, turut dilakukan dalam transformasi ekonomi digital dan transformasi energi. Transformasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi hijau yang akan berkontribusi pada penyelesaian persoalan lingkungan di tingkat global.

Presiden menjelaskan bahwa dalam mengerjakan kerja besar transformasi bangsa, pemerintah masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari para insan pers agar langkah besar tersebut benar tereksekusi sehingga membawa perubahan bagi kemajuan Indonesia.



“Kritik, masukan dan dukungan dari insan pers sangat-sangat penting. Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia maju,” imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa pers mempunyai tugas besar selama Indonesia memegang keketuaan Group of Twenty (G20) tahun 2022. Sejumlah agenda penting akan berlangsung dan pers diharapkan mampu menyukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan informasi yang positif.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga yang kita miliki dengan mengabarkan kabar baik dan kabar kebaikan, menunjukkan ketangguhan dan kekuatan kita, kekompakan, persatuan, gotong royong, solidaritas yang menjadi modal penting kita dalam menghadapi pandemi,” ungkap Presiden.

(BPMI Setpres)





<https://www.presidenti.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-pers-adalah-lokomotif-kemajuan-bangsa/>



Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah anak yang tengah belajar matematika di kawasan Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 3 Februari 2022. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Saat Presiden Bertemu Anak- Anak Pandai Matematika di Humbang Hasundutan

Anak-anak tersebut belajar matematika dengan metode gasing (gampang, asyik, menyenangkan).

Di luar agenda yang telah ditetapkan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah anak yang tengah belajar matematika di kawasan Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 3 Februari 2022. Anak-anak

tersebut belajar matematika dengan metode gasing (gampang, asyik, menyenangkan).

Di hadapan Presiden Jokowi, anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghitung cepat matematika dasar seperti perkalian, penambahan, hingga pecahan, tanpa menggunakan alat bantu kalkulator.

Profesor Yohanes Surya yang membimbing mereka mengatakan bahwa metode gasing memanfaatkan lagu, latihan logika, otak kiri-kanan, hingga motorik. Menurutnya, dengan metode pembelajaran gasing ini, anak-anak jadi lebih cepat belajar berhitung meski belajar dari nol.

“Anak yang tadinya enggak bisa berhitung dari mulai nol, dia bisa belajar begitu cepat sampai jago sekali itu seperti tadi sampai pecahan itu, itu hanya dalam waktu satu bulan,” ujar Profesor Yohanes Surya.

Gloria, siswi kelas 5, salah satu diantaranya merasakan langsung efektivitas metode pembelajaran gasing tersebut. Baginya, metode gasing membuat matematika yang biasanya penuh dengan rumus menjadi menyenangkan.

“Biasanya kalau kita belajar matematika kan banyak banget rumusnya, ini dibuat lebih mudah gitu. Jadi biasanya kan kalau satu pelajaran lebih dari satu bulan, ini benar-benar sebulan belajar pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, pecahan, desimal,” ujar siswi yang bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan tersebut.

Hal senada disampaikan oleh murid lainnya yang bernama Paulus. Sebelum mengikuti gasing, dirinya merasa matematika itu sulit, menyeramkan, dan tidak mudah untuk dipahami.

“Tetapi setelah saya tahu cara-cara cepat yang disiapkan oleh Pak Profesor Yohanes Surya saya makin lebih paham dan makin mengerti apa itu matematika dan dapat menjawabnya tanpa ragu-ragu dan jelas,” jelasnya.

Paulus ingin agar ilmunya tersebut bisa ditularkan kepada teman-teman sekolahnya dan bisa dipakai untuk berpartisipasi dalam olimpiade matematika. Ia pun merasa senang sekaligus terkejut dengan kedatangan Presiden.

“Seperti mimpilah, karena baru pertama kali bertemu. Jadi tadi sempat kaya panik gitu, tapi setelah melihat Bapak Presiden tercengang jadi enggak panik lagi,” ungkapnya.

Profesor Yohanes Surya berharap metode gasing ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran numerasi di seluruh Indonesia.

“Jadi anak-anak di seluruh Indonesia bisa menikmati pembelajaran gasing ini, karena begitu mudahnya, dan begitu asik, menyenangkan,” tutupnya.

Kepada anak-anak tersebut, Presiden Jokowi berpesan agar mereka terus belajar dengan rajin.

“Ya anak-anak terima kasih. Belajar terus ya,” pesan Presiden Jokowi. **(BPMI Setpres)**



“

Anak yang tadinya enggak bisa berhitung dari mulai nol, dia bisa belajar begitu cepat sampai jago sekali itu seperti tadi sampai pecahan itu, itu hanya dalam waktu satu bulan.

”

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/saat-presiden-bertemu-anak-anak-pandai-matematika-di-humbang-hasundutan/>

Presiden Jokowi Tanam Pohon

Bersama Masyarakat di Desa Simangulampe



Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 3 Februari 2022. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Kepala Negara menanam tanaman kacang macadamia, yang merupakan salah satu jenis tanaman hasil hutan bukan kayu.

Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 3 Februari 2022. Kepala Negara menanam tanaman kacang macadamia, yang merupakan salah satu jenis tanaman hasil hutan bukan kayu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dyah Murtiningsih, dalam keterangannya mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon kali ini dilakukan di area seluas 10 hektare dengan metode teknik konservasi tanah dan air, dan agroforestri.

“Kita lihat di sini tanahnya kondisinya curam sehingga kita perlu melakukan kegiatan konservasi tanah dan air berupa terasering,” ucap Dyah.

Dyah pun berharap melalui kegiatan penanaman pohon ini, nantinya kawasan hutan lindung yang ada di sekitar Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan dapat terjaga dengan baik, termasuk mengurangi terjadinya erosi.

“Harapannya nanti kawasan hutan lindungnya terjaga, erosinya juga menjadi berkurang ataupun tidak terjadi erosi, dan masyarakat tetap bisa memanfaatkan hasil tanaman dari hasil rehabilitasi hutan ini. Karena kita tanam tanaman dengan jenis hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan buahnya atau hasil yang lainnya,” ungkap Dyah.

Senada, Juwita Sitorus, salah seorang warga yang juga petani di Desa Simangulampe, berharap kegiatan penanaman pohon ini dapat memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, mulai dari meningkatnya kesejahteraan hingga terhindar dari bencana banjir.

“Bagus, jadi masyarakat Simangulampe nanti biar makin maju, makin sejahtera. Jadi kalau di pegunungan ini ditanami pohon, daerah kita itu makin sejuk, terhindar dari bencana terutama banjir. Kita kan di daerah pegunungan ya, jadi kita senang sekali program ini,” ujar Juwita.

Sementara itu, Togu Simorangkir yang merupakan seorang aktivis lingkungan berharap kegiatan penanaman pohon ini memiliki tindak lanjut dalam jangka panjang. Ia tidak ingin pohon tersebut hanya ditanam namun tidak dirawat dengan baik sehingga mati dan tidak dapat memberikan manfaat.

“Kita tidak hanya sekedar tahu menanam, tapi tahu kita merawat karena memang kita menyiapkan sesuatu untuk generasi kita yang mendatang ini. Jadi tanam dan rawat pohon seharusnya programnya, bukan menanam pohon saja. Kita memastikan pohon yang kita tanam itu hidup,” tutur Togu.

Guna memastikan hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun Dwi

Januanto Nugroho menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan masyarakat dan kelompok tani sekitar untuk melakukan perawatan terhadap pohon-pohon yang ditanam selama tiga tahun ke depan.

“Dari fase awal perencanaan, dari fase awal sebelum kita melakukan input teknis itu sudah kita komunikasikan dengan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok tani dan sifatnya kerja sama tiga tahun,” ucap Dwi.

Turut hadir dalam kegiatan penanaman pohon adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.

(BPMI Setpres)



Kebijakan **Ekonomi** **Makro** Tahun 2023

Akan Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN



Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 16 Februari 2022. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Pemerintah akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 dengan sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global.

Pemerintah akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 dengan sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global. Untuk itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung pada APBN.

Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 16 Februari 2022.

“APBN tetap akan suportif, namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting. Tadi konsumsi investasi ekspor seperti yang disampaikan oleh Pak Menko (Perekonomian) di mana kenaikannya cukup tinggi dan juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan,” ujar Menteri Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, saat ini perbankan —dengan dana pihak ketiga mencapai Rp7.250 triliun dan *loan to deposit ratio* hanya 77 persen— memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit. Pertumbuhan kredit saat ini juga sudah mulai pulih dan tumbuh di 5,2 persen, dari sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun lalu.

Kedua, sumber pertumbuhan juga berasal dari pasar modal, dalam hal ini pasar saham dan obligasi. Pasar saham mencapai Rp7.231 triliun dan selama ini naik 3,77 persen, sementara pasar obligasi yang mencapai Rp4.718 triliun naiknya 9,65 persen.

“Bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO *rights issue* maupun mengeluarkan obligasi. Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor,” tambahnya.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara yang pemulihan ekonominya sudah bisa mencapai level sebelum pandemi Covid-19, bahkan di atasnya. Hal tersebut didukung oleh pemulihan baik dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksi yaitu manufaktur, perdagangan, dan konstruksi.

“Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat hanya lima kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi musibah Covid-19. Banyak negara-negara di tetangga kita ASEAN maupun *emerging country* di dunia yang belum mencapai *pre-Covid level*, bahkan mereka GDP-nya masih ada di sekitar 94 sampai 97 persen,” imbuhnya.

Lebih jauh, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Presiden menekankan agar pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Menurut Sri Mulyani, produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan sumber daya

manusia (SDM), infrastruktur, dan kualitas birokrasi serta regulasi. Hal tersebut yang kemudian menjadi pokok bagi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Pemerintah juga mengidentifikasi pusat-pusat atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi yang berasal dari beberapa hal. Pertama, sisi pola hidup normal baru sesudah pandemi, terutama berbasis kesehatan. Kedua, reformasi di bidang investasi dan perdagangan. Transformasi di sektor manufaktur baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral menjadi sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi.

“Ketiga, yang perlu untuk terus ditingkatkan adalah kesadaran ekonomi hijau di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan menjadi sumber atau diandalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Ini yang akan didukung oleh APBN untuk tahun 2023, di mana kita berharap pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan ada dalam *range* 5,3 hingga 5,9 (persen),” untkapnya.

Sementara itu, dinamika lain dalam kondisi global yang harus diwaspadai menurut Menteri Keuangan adalah lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju. Seperti diketahui, Amerika Serikat mencatatkan inflasi sebesar 7,5 persen pada bulan Februari ini dan hal tersebut akan mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas.

“Tentu ini akan memberikan dampak *spillover* atau rambatan yang harus diwaspadai yaitu dalam bentuk *capital flow* akan mengalami pengaruh negatif dari kenaikan suku bunga, dan juga dari sisi *yield* atau imbal hasil dari surat berharga, yang tentu akan mendorong dari dalam hal ini biaya untuk surat utang negara,” jelasnya.

Selain di negara-negara maju, inflasi juga terjadi di negara-negara berkembang seperti Argentina dengan inflasi mencapai 50 persen, Turki mencapai 48 persen, kemudian Brasil 10,4 persen, Rusia 8,7 persen, dan Meksiko 7,1 persen. “Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan tergerus. Ini yang akan diwaspadai,” tandasnya. **(BPMI Setpres)**

Dari Vaksinasi Booster hingga WFH, Cara Menkominfo Tekan Tren Omicron

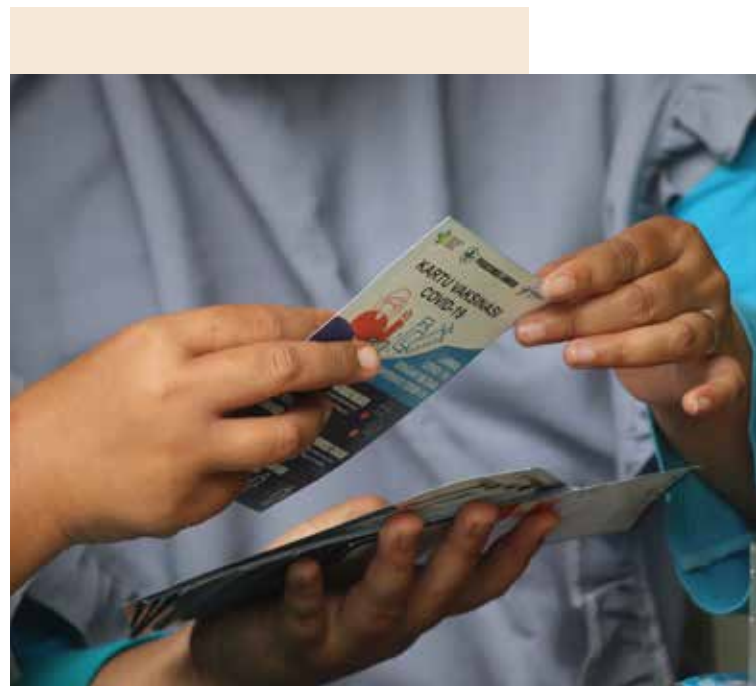


Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan global. Kita menyaksikan hampir seluruh negara di dunia melakukan berbagai upaya dan strategi dalam memutus mata rantai wabah. Tidak terkecuali Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama hampir tiga tahun terakhir banyak melakukan terobosan untuk memulihkan dua sektor utama, yakni kesehatan dan ekonomi. Kepala Negara sedari awal telah memastikan seluruh fasilitas layanan kesehatan dan obat-obatan hingga vaksinasi di pusat dan daerah harus terus dilakukan secara berkala. Demikian halnya dengan kebijakan yang selaras dengan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, menyiapkan berbagai instrumen agar masyarakat tetap hidup produktif.

Wabah pandemi saat ini telah masuk ke fase atau gelombang ketiga melalui varian Omicron. Menanggapi peningkatan tren varian Omicron, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat agar tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan, namun tidak mesti bereaksi berlebihan yang menimbulkan kepanikan. Sebab, hasil studi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebutkan bahwa varian Omicron memang lebih mudah menular dibanding varian sebelumnya, akan tetapi gejalanya jauh lebih ringan.



Kita harus waspada, jangan jemawa, dan jangan gegabah. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah (*work from home*) lakukanlah kerja dari rumah



Selain meminta masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah untuk mengurangi mobilitas dalam negeri, Kepala Negara berharap masyarakat tidak bepergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak esensial.

Kepada pimpinan kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya vaksinasi dalam upaya penanganan wabah pandemi, khususnya pada peningkatan varian Omicron saat ini. Kemudian, kepada masyarakat, Presiden meminta program vaksinasi tahap satu, tahap dua, dan vaksin *booster* yang telah disiapkan pemerintah secara gratis harus ambil bagian di dalamnya.

“Yang belum mendapatkan vaksin, segeralah untuk divaksin. Yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, segera vaksin untuk yang kedua. Yang sudah dua kali vaksin, segera cari vaksin ketiga, vaksin *booster*. Semuanya gratis karena vaksinasi penting demi keselamatan kita semuanya,” tegas Kepala Negara.

Menkominfo Gerak Cepat

Merespons arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan kerja kolaborasi untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 khususnya pada varian Omicron, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik untuk internal civitas Kementerian Kominfo maupun kebijakan komunikasi publik agar diseminasi informasi terkait pandemi kepada masyarakat tidak menimbulkan hoaks dan disinformasi.

Khusus di lingkungan Kementerian Kominfo, Menteri Johnny di awal bulan Februari memerintahkan dan mewajibkan seluruh civitas untuk mengikuti program vaksinasi ketiga yakni vaksin booster sebagaimana yang menjadi arahan Presiden.





Menurut Menkominfo, program vaksin *booster* yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menekan penyebaran Covid-19 terutama varian Omicron.

“Pemerintah telah bersiap untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian baru. Namun, untuk meningkatkan perlindungan, saya memerintahkan agar seluruh pegawai mengikuti vaksinasi *booster* dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat dalam kegiatan sehari-hari terutama ketika bekerja di kantor,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate.

Langkah cepat yang dilakukan Menteri Johnny tentunya selain mengurangi dampak penyebaran varian Omicron, produktivitas kerja di sektor komunikasi dan informatika yang menjadi salah satu sektor penting di masa pandemi tetap berjalan dengan baik. Terlebih lagi, vaksin penguat atau *booster* telah terbukti aman dan efektif meningkatkan imunitas tubuh. Hal itu sesuai hasil uji klinis pemerintah, di mana pemberian vaksin *booster* untuk subyek penelitian tidak menunjukkan efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang berat.

Meskipun produktivitas kerja menjadi prioritas, Menkominfo Johnny G. Plate juga memikirkan faktor kesehatan dan bahaya penyebaran varian Omicron yang angka kasusnya cukup meningkat beberapa hari terakhir di lingkungan Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, pembagian aktivitas kerja antara Work From Home (WFH) dan Work Form Office (WFO) pun disesuaikan.

“Saya sudah perintahkan untuk mengatur pembatasan kerja, tapi itu belum cukup. Masih ada yang terinfeksi hingga tercatat sekitar 123 orang di kantor pusat. Karena itu, satu langkah yang diupayakan dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi *booster* ini. Setiap harinya kita vaksinasi sekitar 600 pegawai, dan untuk tahap awal kita targetkan semua pegawai di kantor pusat serta yang ada di sekitar Jakarta bisa mengikuti vaksinasi,” tegasnya.

Aturan khusus mengenai kegiatan WFO di lingkungan Kementerian Kominfo, Menkominfo Johnny G. Plate menekankan pada empat aspek. Pertama, kegiatan terbatas hanya dapat dilakukan dari kantor dan tidak memungkinkan untuk dilakukan dari rumah. Kedua, kegiatan pelayanan publik. Ketiga, kegiatan vaksin *booster* hanya dilakukan sampai tanggal 8 Februari 2022. Keempat, kegiatan *urgent* lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.

Dari empat arahan tersebut, Menteri Johnny meminta seluruh pegawai yang melaksanakan WFO wajib untuk melakukan tes antigen sebelum memasuki gedung atau memulai kegiatan di lingkungan perkantoran yang difasilitasi oleh Klinik Pratama Kementerian Kominfo.



Waspada, Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19

Akhirnya, gelombang ketiga Covid-19 pun menghampiri Indonesia. Sendi-sendi kehidupan ekonomi-sosial yang baru mulai berdiri, kembali diuji. Namun, pemerintah tidak berdiam diri menghadapi fenomena tersebut. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk menyiapkan berbagai strategi preventif untuk menghadapi gelombang ketiga Covid-19.

Sebagai respon cepat tanggap, pada akhir tahun 2021 lalu, Pemerintah kembali menaikkan level PPKM menjadi Level 3.



Ultimatum Presiden

Dilansir dari berbagai sumber, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Salah satunya adalah dengan memberi ultimatum kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, untuk memaksimalkan kinerja aparat kepolisian di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, Presiden tidak segan-segan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda yang kinerjanya tidak maksimal terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Saya sudah titip kepada Kapolri, hati-hati Kapolda-mu. Kalau kira-kira (kasus positif) naik terus, saya akan perintah untuk diganti. Ternyata (kasusnya) turun, turun, turun. Artinya, semua takut dicopot,” tegas Presiden Jokowi saat mengapresiasi kinerja gabungan TNI-Polri yang ikut mengendalikan kasus positif Covid-19 selama tahun 2021.

Selain ultimatum kepada aparat keamanan, Presiden Jokowi juga kembali mengorkestrasi kerjasama dan kolaborasi yang solutif dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga bersama para kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pendekatan kedua yang dilakukan pemerintah adalah persuasif-preventif. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam pendekatan ini, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk mengurangi mobilitas, tidak bepergian ke luar negeri, dan melakukan vaksinasi.



Peran Menteri Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pun ikut ambil bagian penting dalam upaya mengatasi gelombang ketiga Covid-19. Bahkan sejak November 2021 lalu, Menkominfo terus meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas jelang hari libur Natal dan Tahun Baru, guna mencegah gelombang ketiga.

Memasuki awal tahun 2022, ketika angka positif Covid-19 kembali naik, Menteri Kominfo melalui berbagai kanal terus mengimbau masyarakat untuk memperhatikan penerapan prokes, serta ikut dalam program vaksinasi nasional.

Menteri Johnny meminta kepada masyarakat untuk mematuhi setiap peraturan dan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19, khususnya di masa gelombang ketiga varian Omicron. Oleh karena itu, salah satu langkah penting saat ini adalah menuntaskan vaksinasi baik dosis pertama, dosis kedua maupun dosis ketiga atau *booster*.

Pada 5 Februari 2022, Menteri Johnny memerintahkan seluruh civitas Kementerian Kominfo untuk melakukan vaksin *booster*. Perintah itu disampaikan melalui Siaran Pers No. 37/HM/KOMINFO/02/2022 tentang Tekan Penyebaran Omicron, Menkominfo Perintahkan Pegawai Kominfo Jalani Vaksin Dosis Ketiga.



Melawan Infodemik

Selain mengamplifikasi imbauan presiden kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi, Menteri Johnny bersama perangkat kerja di Kementerian Kominfo juga aktif memerangi infodemik terkait vaksin dan isu Covid-19 lainnya, yang berseliweran di jagad maya.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo mencatat telah menemukan dan melakukan pemutusan akses terhadap 565.449 konten negatif.

Kementerian Kominfo juga telah melakukan debunking atau penerbitan klarifikasi terhadap 1.773 misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat, terlebih di dalamnya tentang Covid-19.

Sepanjang 2021 sendiri, Kementerian Kominfo telah menemukan sebanyak 723 hoaks seputar Covid-19. Adapun hoaks yang ditemukan tersebut meliputi berbagai isu. Mulai dari vaksinasi, gejala Covid-19, kejadian ikutan pasca imunisasi, isu "plandemi" (pandemi yang di-plan atau direncanakan), keterlibatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keterkaitan elite global dan pandemi, serta pernyataan-pernyataan dari tokoh publik yang tidak terbukti kebenarannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang paling dinamis dalam menyebarkan berbagai isu. Kementerian Kominfo bahkan mengamati semua isu hoaks khususnya di lima platform digital media sosial, yakni Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok.

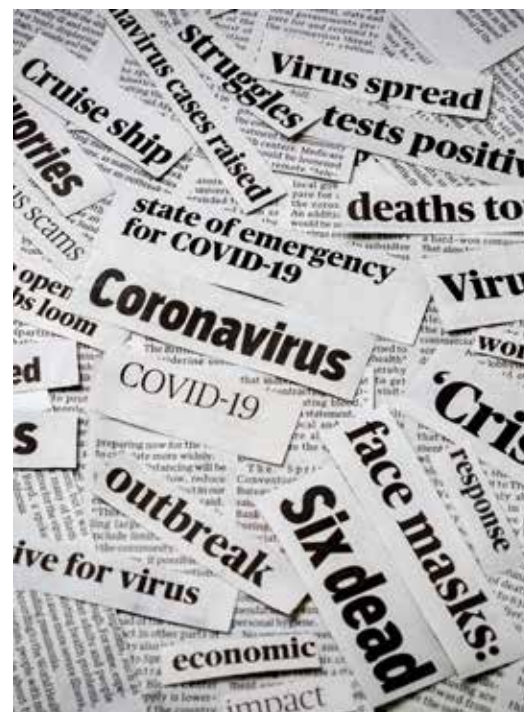


Menurut data Kominfo, dalam kurun waktu dua minggu, yakni sejak 23 Januari 2022 hingga 6 Februari 2022, telah ditemukan 2.099 isu hoaks Covid-19. Isu hoaks tersebut memiliki total sebaran sebanyak 5.486 konten. Dimana sebanyak 5.299 konten sudah di-take down, dan 187 lainnya masih ditindaklanjuti.

Dari angka tersebut, sebanyak 767 konten akan ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Dari total sebaran sebanyak 5.486 konten, hoaks terbanyak ditemukan di media sosial Facebook, yakni sebanyak 4.781 konten, disusul Twitter 573 konten, Youtube 55 konten, Instagram 52 konten, dan TikTok sebanyak 25 konten.

Tentunya Kominfo akan terus melakukan pemantauan secara berkala terkait penyebaran konten-konten hoaks di media sosial, termasuk secara khusus melakukan pemantauan infodemic terkait vaksin dan isu Covid-19 lainnya.





Akhiri Omicron:

Sukseskan DEWG G20 Indonesia dan Agenda Besar Kominfo



Sepanjang tahun 2022 ini, Kementerian Kominfo fokus menyukseskan Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk komunikasi publik dan diberikan mandat dalam memimpin Digital Economy Working Group (DEWG)



Pandemi Covid-19 belum berakhir. Varian demi varian masih terus terjadi. Tapi tentunya semua berharap Omicron menjadi varian terakhir untuk mengakhiri wabah yang telah menyerang masyarakat dunia hampir tiga tahun terakhir. Kita telah menyaksikan hampir semua negara terdampak. Dari negara maju, negara berkembang hingga negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah. Semuanya terbalut dalam bencana global, tapi kerja keras, tindakan kolaborasi dan elaborasi terus dimainkan antar negara. Badan Kesehatan Dunia atau WHO terus mengumandangkan perkembangan pandemi di setiap negara berikut tantangan dan cara mengatasinya.

Selama pandemi pula, negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang super hebat ikut terdampak, fasilitas kesehatan yang semakin minim akibat lonjakan kasus yang drastis. Semua negara butuh pemulihan, baik pemulihan ekonomi, kesehatan maupun sektor penting lainnya. Tidak terkecuali negara kita tercinta, Indonesia.

Untuk memulihkan sektor ekonomi, kesehatan dan sektor lainnya. Tidak bisa dipungkiri dan menjadi sebuah keniscayaan bahwa sektor komunikasi dan informatika lah salah satu penopangnya. Sektor ini menjadi titik terang setiap negara yang betul-betul dimanfaatkan untuk mengakhiri pandemi. Di Indonesia, pemerintah pun sejak awal pandemi telah menegaskan hal itu.



Diharapkan nanti dengan demikian, komunikasi publik menjadi lebih baik, bisa menjangkau masyarakat di dalam negeri lebih luas dan masyarakat luar negeri.



Agenda Kominfo Jalan Terus

Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinan Johnny G. Plate memastikan program-program nasional sektor Kominfo akan terus dituntaskan sesuai target meskipun di tengah pandemi Covid-19, khususnya di masa gelombang ketiga varian Omicron. Sepanjang tahun 2022 ini, Kementerian Kominfo fokus menyukseskan Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk komunikasi publik dan diberikan mandat dalam memimpin *Digital Economy Working Group* (DEWG). Sedangkan program-program lainnya dimulai dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga menyiapkan SDM talenta digital juga terus dilakukan.

Pertama, **DEWG Presidensi G20 Indonesia 2022**. Pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan tersendiri dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Kepercayaan Anggota Negara G20 kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah tahun ini tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, untuk memasifkan informasi mengenai penyelenggaraan pertemuan tingkat global itu, Pemerintah telah membentuk tim Juru Bicara Komunikasi Publik Presidensi G20 Indonesia 2022, salah satu tim juru bicara adalah Menkominfo Johnny G. Plate.

SOFA TALK - DIGITAL ECONOMY WORKING GROUP KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM ISU DIGITAL DI FORUM G20

✂️ Rabu, 26 Januari 2022



Pemerintah, kata Menkominfo, akan terus melakukan sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia dengan baik. Ikhtiar itu diperkuat dengan sasaran dan target secara berkala. Sasaran dan target yang dimaksud difokuskan pada tiga isu prioritas, yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transisi ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital dan ekonomi. Tiga isu prioritas itu akan dibahas pada bidang substansi baik Sherpa Track, Finance Track dan Engagement Group melalui *working group* masing-masing.

Diharapkan nanti dengan demikian, komunikasi publik menjadi lebih baik, bisa menjangkau masyarakat di dalam negeri lebih luas dan masyarakat luar negeri. Juga tentu kita berharap kolaborasi dari media, baik media nasional maupun media internasional yang berkaitan dengan semua sektor dan aspek yang dibicarakan di G20 Summit nanti," ujar Menkominfo.

Secara spesifik, DEWG yang masuk dalam bidang substansi Sherpa Track. Kementerian Kominfo telah memulai beberapa rangkaian kegiatan sosialisasi dan promosi. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah Sofa Talk Series yang menghadirkan pembicara Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang juga sebagai Chair DEWG Mira Tayyiba, Juru Bicara Kementerian Kominfo selaku Co-Chair DEWG Dedy Permadi,



serta narasumber dari mitra National Strategic Stakeholders dan National Knowledge Partner. Sebagai informasi, Sofa Talk Series diselenggarakan secara virtual setiap minggunya dengan menghadirkan berbagai narasumber dari mitra-mitra strategis di atas.

Kedua, **Program Nasional Sektor Kominfo.** Presiden Joko Widodo pada 3 Agustus 2020, tepatnya beberapa bulan pasca Pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19, telah memberikan lima arahan transformasi digital nasional. Arahan Kepala Negara itu ditujukan kepada Menkominfo Johnny G. Plate.

Adapun kelima arahan tersebut antara lain; percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, persiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepat integrasi Pusat Data Nasional, siapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan regulasi yang berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan.

Menindaklanjuti arahan Kepala Negara, Menkominfo Johnny G. Plate telah dan akan terus menuntaskan target pembangunan program-program prioritas Kementerian Kominfo dari hulu hingga hilir. Target pembangunan program nasional sektor komunikasi dan informatika itu diperkuat melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan mitra strategis.

Untuk program pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus mengejar target penyelesaian Base Transceiver Station (BTS) 4G di seluruh wilayah 3T dan wilayah non 3T oleh operator seluler. Sebagaimana arahan Presiden, BAKTI Kominfo menargetkan seluruh Indonesia akan ter-cover sinyal 4G setidaknya pada akhir tahun 2022 ini untuk menjawab agenda transformasi digital nasional.

Selain menuntaskan pembangunan BTS 4G, Kementerian Kominfo juga menyiapkan skema, regulasi dan percepatan kinerja untuk program pembangunan lainnya seperti akses internet gratis bagi tempat pelayanan publik, program Satelit Multifungsi (SATRIA-1), pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) hingga menyiapkan skema pendanaan dan pembiayaan untuk menuntaskan program-program tersebut.



Apa itu DEWG?

DEWG berawal dari pembentukan Gugus Tugas Ekonomi Digital atau Digital Economy Task Force (DETF) G20 pada tahun 2017 pada masa Kepresidenan Jerman. Tujuan DETF membahas Inisiatif Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi Digital yang diadakan pada tahun 2016 pada masa Kepresidenan China.

Sumber: <https://kominfo.go.id/content/detail/39296/apa-itu-dewg-g20/0/g20dewg>

Dari sisi hilir, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan program-program khusus pengembangan talenta digital nasional atau SDM digital. Terdapat tiga tingkat program pelatihan yakni tingkat *basic* melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), tingkat *intermediate* melalui pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) dan tingkat *advance* melalui Digital Leadership Academy (DLA).

Tiga tingkatan pelatihan SDM digital tersebut juga masing-masing menargetkan banyaknya jumlah peserta setiap tahunnya. Program GNLD menargetkan 12,5 juta peserta dalam setahun dan untuk mencapai target 50 juta masyarakat terliterasi digital di tahun 2024, program DTS menargetkan 600 ribu peserta dan program DLA untuk saat ini menargetkan sekitar 300-400 peserta.

Sama seperti upaya menyukseskan Presidensi G20 Indonesia, program-program prioritas nasional sektor Kominfo itu juga dominan dilakukan secara virtual dan hibrida. Sehingga di masa gelombang ketiga pandemi Covid-19 varian Omicron diharapkan tidak menjadi kendala yang berat dalam menuntaskan ikhtiar Kominfo wujudkan Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju.



Prioritaskan Keselamatan Rakyat, Vaksinasi *Booster* Diberikan

Secara Gratis

Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama.

- Presiden Joko Widodo

Indonesia kini tengah melakukan vaksinasi tahap ketiga yang sudah dilaksanakan sejak pertengahan Januari 2022. Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi tahap tiga itu diberikan secara gratis kepada masyarakat secara khusus bagi golongan tenaga kesehatan, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers secara virtual yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 11 Januari 2022 lalu.

"Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama," tegas Jokowi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mendorong percepatan vaksinasi di daerah dengan memfokuskan suntikan kedua dan penguat (*booster*) terutama bagi para lansia dan di tempat-tempat dengan interaksi tinggi.

"Saya hanya ingin mendorong agar seluruh kabupaten/kota dan provinsi ini konsentrasi di suntikan yang kedua, dan juga suntikan yang ketiga atau *booster*. Karena dosis kedua dan dosis ketiga ini saya lihat masih banyak yang masih di bawah 60 persen, masih rendah, dan agar didahulukan yang lansia," ujarnya.



Sumber Foto: Reuters/Dado Ruvic

Strategi Satgas

Mempercepat Vaksin

Dilansir dari covid19.go.id, Senin, 7 Februari 2022, ada lima strategi jitu pemerintah daerah mempercepat laju vaksinasi. **Pertama**, menggelar vaksinasi berbasis administrasi pemerintah, **kedua** mendirikan pusat vaksinasi yang mudah diakses, **ketiga**, melakukan vaksinasi dengan jemput bola, **keempat**, memprioritaskan vaksinasi lansia dan **kelima**, memberi hadiah bagi mereka yang bersedia divaksin.

Sementara itu, pada Sabtu 22 Januari 2022 yang lalu, Indonesia menerima kedatangan vaksin Pfizer yang merupakan donasi COVAX. Vaksin yang tiba pada tahap ke-201 ini berjumlah 1.257.750 dosis.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022) malam.

"Kami atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada COVAX," ujar Usman.

Dirjen Usman mengungkapkan, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator COVAX Facility. COVAX atau Covid -19 Vaccines Global Access sendiri merupakan sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara untuk vaksin-vaksin Covid -19.

Melalui COVAX juga, Indonesia terus aktif mengampanyekan kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara di dunia. "Indonesia berperan aktif dalam upaya menyetarakan akses vaksin bagi negara-negara di dunia," paparnya.

Pendaftaran, Jenis, dan Jadwal Vaksin

Ada dua cara yang dilakukan untuk mendaftar vaksinasi booster. Pertama, masyarakat bisa mendaftar vaksinasi booster dengan mendatangi langsung lokasi vaksinasi. Pada saat pendaftaran, masyarakat perlu membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan 2.

Cara kedua yakni **melalui Aplikasi PeduliLindungi**. Berikut langkah-langkah mendaftar vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi:



- ➔ Buka laman Pedulilindungi.id
- ➔ Pilih menu "Login/Register" yang berada di bagian pojok kanan atas
- ➔ Pilih menu "Buat akun Pedulilindungi"
- ➔ Lakukan registrasi akun dengan memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan alamat email
- ➔ Centang "Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi"
- ➔ Klik "Daftar" Jika sudah, maka Anda akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui email atau SMS
- ➔ Masukkan kode OTP, lalu pilih opsi "Verifikasi" Akun Anda akan terdaftar dan masuk ke dashboard atau halaman utama akun Pedulilindungi



- ➔ Klik menu "Pendaftaran Vaksinasi" di bagian kiri tengah Isi data diri seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, kota sesuai KTP, dan alamat Klik opsi "Selanjutnya"
- ➔ Lakukan konfirmasi mengenai informasi penerima vaksin Masukkan kode verifikasi Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran vaksin Covid

Lokasi vaksinasi terdiri dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah, seperti Puskesmas, rumah sakit milik pemerintah maupun pemda, juga posko pelayanan yang dikoordinasikan dinas kesehatan.

Jenis Vaksin

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Selasa 11 Januari 2022 lalu mengungkapkan, ada tiga kombinasi jenis vaksin Covid-19 sebagai vaksin booster.

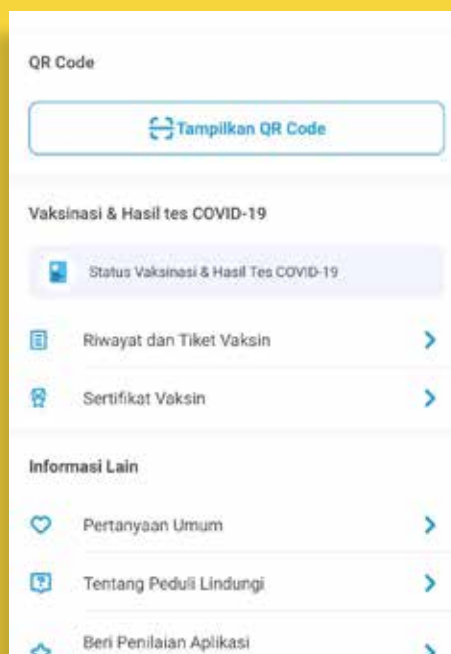
Pertama, penerima vaksin Sinovac dosis pertama dan dosis kedua diperbolehkan menggunakan vaksin Pfizer setengah dosis sebagai vaksin booster. Kedua, penerima vaksin Sinovac dosis lengkap juga dapat menggunakan setengah dosis vaksin AstraZeneca sebagai vaksin booster. Ketiga, penerima vaksin AstraZeneca dosis lengkap bisa menggunakan setengah dosis vaksin Moderna sebagai vaksin booster.

Menurut Budi, tiga kombinasi jenis vaksin booster tersebut berdasarkan ketersediaan vaksin yang ada dan hasil riset yang sudah disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan ITAGI.

“Sudah disetujui BPOM dan ITAGI yang nantinya bisa berkembang tergantung pada hasil riset yang baru dan ketersediaan vaksin yang ada,” tuturnya.

Adapun cara untuk mengetahui jadwal vaksin yakni melalui aplikasi PeduliLindungi. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Buka aplikasi PeduliLindungi
- b. Masuk dengan akun yang terdaftar
- c. Klik menu “Profil” dan pilih “Status Vaksinasi & Hasil Tes Covid-19”
- d. Status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di akun
- e. Untuk cek tiket vaksin, masuk ke menu “Riwayat dan Tiket Vaksin”







Vaksin *Booster* di Kementerian Kominfo

Guna mencegah penularan Covid-19 varian Omicron dan varian lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan vaksinasi booster untuk para pegawainya selama empat hari. Vaksinasi Covid-19 dosis lanjutan (booster) ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan, serta memperpanjang masa perlindungan setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap.

Kepala Biro Umum, Sensilaus Dore, memberikan sambutan pada hari pertama Pelaksanaan Vaksinasi Booster Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (04/02/2022). Pemberian vaksin ini ditargetkan untuk 4.987 pegawai, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo



Proses pendaftaran dan pemeriksaan berkas dibantu oleh petugas vaksinasi. Pada hari pertama pelaksanaan, tercatat ada 558 pegawai telah melakukan penyuntikan vaksinasi booster di Kementerian Kominfo.



Suasana pelaksanaan vaksin booster di lingkungan Kementerian Kominfo. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Kominfo menjadi kementerian kedelapan yang melaksanakan program vaksinasi booster setelah sebelumnya Kemensetneg telah mengawalinya pada 18 s.d 21 Januari 2022, disusul Kemendikbudristek di tanggal 25 s.d 29 Januari 2022, lalu Kementerian ATR/BPN pada 26 s.d 28 Januari 2022.

Selanjutnya Kementerian Perdagangan di tanggal 27 s.d 29 Januari 2022, Kementerian KKP pada 31 Januari s.d 11 Februari 2022, Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 2 s.d 3 Februari 2022, serta Kementerian PPA di tanggal 3 Februari 2022.



Reporter KominfoNext berbincang dengan Tri Setyanti, Dokter Umum yang kesehariannya bertugas di Bagian Program Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Menurutnya pelaksanaan vaksin booster di Kementerian Kominfo akan diutamakan menggunakan jenis Vaksin AstraZeneca, mengingat ketersediaan stok vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Gambir.

Komitmen dan Tantangan Dukung Jurnalisme Berkualitas

JH Philip Gobang

Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik

Kaisar Imperium Romawi, Titus, mengungkapkan sebuah adagium di hadapan Senat Romawi pada masa lampau: *Verba volant, scripta manent*. Artinya, "Kata-kata terbang, tulisan menetap."

Adagium ini menjelaskan, kata-kata lisan dapat dilupakan dengan mudah, tetapi tulisan-tulisan akan tetap ada dan senantiasa menghiasi peradaban. Inilah mengapa buku-buku disebut sebagai saksi peradaban.

Di Indonesia, budaya tulisan, dunia jurnalistik, media, dan kehidupan pers telah menjadi bagian integral dari ruang publik dan kehidupan masyarakat. Pasca Orde Baru, geliat media semakin berkumandang ke berbagai penjuru negeri. Memasuki era reformasi, eksistensi kehidupan pers di Indonesia semakin kuat. Banyak media yang bertumbuh subur dan menjadi pewarta informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (*social control*) perilaku publik dan penguasa.

Berkaca pada UU di atas, media-media *mainstream* telah menjadi semacam *backbone*, tulang punggung



demokrasi, yang selama lebih dari dua dekade menjadi corong suara publik kepada pemerintah, dan sebaliknya: pemerintah kepada publik.

Berbagai pemikiran ahli pun turut memenuhi halaman-halaman media dengan pemikiran-pemikiran yang progresif dan futuristik. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit media mengambil peran sebagai *Watchdog*, yang senantiasa mengawasi, menguji, dan mengkritik kebijakan publik pemerintah bila dinilai bertentangan dengan prinsip *bonum commune*.

Fenomena disrupsi telah membuat media bermetamorfosis menjadi kekuatan keempat dalam konstelasi trias politika Montesquieu. Sama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, eksistensi media telah menjadi bagian integral dari demokrasi.

Namun, seiring dengan fenomena disrupsi yang menjadi tren selama satu dekade terakhir di Indonesia, kekuatan media pemberitaan yang begitu berjaya pada awal-awal era reformasi, mulai meredup secara perlahan.

Masyarakat mulai akrab dengan *new media*: media baru. Media interaktif yang berkembang oleh karena adanya aksesibilitas internet dan ekspansi jagad digital. Media sosial, sebagai produk unggulan *new media* semakin hari semakin banyak diminati masyarakat seluruh kalangan.

Data terbaru menunjukkan bahwa media sosial merupakan sumber informasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat, yaitu 73%. Sementara itu sumber informasi lainnya seperti televisi adalah 59,70%, berita online 26,70%, situs web pemerintah hanya 13,90%, media cetak 4%, radio 4%, dan kanal lainnya hanya 1,20%.

Data ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi sarana informasi dan komunikasi yang paling banyak diakses publik. Hal ini karena melalui media sosial, masyarakat bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi secara cepat dalam sekali klik.

Namun, ketiadaan *gatekeeper* dan minus etika ruang virtual, pada akhirnya membuat masyarakat justru terpapar hoaks, disinformasi, misinformasi, bahkan malinformasi.

Media sosial, yang dibangun sebagai kanal interaktif publik, justru beralih fungsi menjadi sarana penyebaran hoaks dan berita-berita bohong yang memengaruhi opini publik.

Kementerian Kominfo, sepanjang tahun 2021 telah melakukan penutupan akses terhadap 565.449 konten hoaks di media sosial.

Tentunya *law enforcement* saja tidak cukup. Butuh tindakan preventif untuk mencegah tumbuh kembangnya hoaks di media sosial.

Sebagai bagian dari multi-pihak yang menjadi mitra pemerintah, dukungan dari awak media dan insan pers untuk senantiasa menyebarkan informasi-informasi publik yang sarat akan nilai-nilai optimistik menjadi begitu penting pada era digital ini.

Kehadiran media dan pers sangat dibutuhkan dalam memerangi hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang berseliweran di jagad maya.



Pers yang Futuristik

Pers dan media, tentunya tidak hanya berperan sebagai *Gatekeeper* informasi yang valid, melainkan

sebagai agen perubahan yang membawa bangsa ini menuju transformasi. Sebagai salah satu dari lima komponen pentahelix nasional, eksistensi pers dan media merupakan ihwal yang *sine qua non* dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju.

Peran pers dalam memberikan informasi, edukasi publik, dan kritik sosial menjadikan media sebagai kekuatan yang mampu mendorong transformasi bangsa. Karena itu, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus mendorong ekosistem pers dan media ke arah yang lebih futuristik dan progresif.

Kementerian Kominfo, sebagai lembaga negara yang menaungi pers dan media, senantiasa mengimbau agar pihak industri media bisa berkolaborasi menciptakan ekosistem pers yang sehat, progresif dan futuristik. Mengingat di era transformasi digital, kunci untuk membuat sebuah ekosistem bekerja adalah kolaborasi.

Media perlu mengadopsi dan mengadaptasi teknologi digital bila ingin mempertahankan eksistensinya. Teknologi digital seperti *big data*, *artificial intelligence*, *virtual reality*, *augmented reality*, *extended reality*, bahkan *metaverse* akan mendorong industri pers untuk berkembang secara progresif dan futuristik.

Publisher Right

Dukungan pemerintah terhadap ekosistem industri pers yang sehat juga tampak dalam pengorkestrasian pembentukan payung hukum yang berhubungan dengan hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam sinergitas dengan Kementerian/Lembaga lainnya juga berupaya mendorong ekosistem media untuk mengadopsi *Intellectual Property Right*.

Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan media di tengah disrupsi teknologi. Komitmen pemerintah terhadap eksistensi pers di tanah air dibuktikan melalui dukungan atas persetujuan draft usulan regulasi yang berkaitan dengan *Publisher Right*. Draft yang diusulkan oleh Dewan Pers bersama *Task Force Media Sustainability*

tersebut berjudul Usulan Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Platform Digital.

Berkenaan dengan usulan tersebut, Kementerian Kominfo sebagai lembaga negara yang membidangi aspek media dan komunikasi publik menganggap baik ihwal tersebut. Menkominfo Johnny G. Plate pada tanggal 19 Oktober yang lalu telah menerima draft usulan *Publisher Right* tersebut.

Menteri Kominfo memberikan apresiasi yang tinggi kepada penyusun draft regulasi itu karena berhasil menghimpun suara dan perspektif dari seluruh insan pers di tanah air yakni dari kalangan asosiasi, perusahaan media, serta wartawan.



Apresiasi juga diberikan karena usulan payung hukum tersebut mengatur tentang hubungan baik antara media massa, *publisher*, platform digital serta menjaga koeksistensi media di Indonesia.

Menurut Menkominfo, sesuai arahan Presiden, pada saat Indonesia membangun infrastruktur secara besar-besaran, juga harus mampu memanfaatkan hilirisasi di sisi ruang digital itu sendiri. Karenanya, relasi dan hubungan bisnisnya harus dijaga agar koeksistensinya bisa berlangsung dengan baik supaya manfaat di ruang digital bisa dirasakan secara berimbang.

Selain itu juga dilakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan ruang digital yang tidak produktif dan upaya melindungi masyarakat dari berbagai hoaks, disinformasi maupun malinformasi. Draft usulan *Publisher Right* semakin memperkuat

...pemerintah
menindaklanjuti
usulan yang
tertuang dalam
draft tersebut untuk
memastikan hilir atau
downstream ruang
digital kita punya
playing field yang
sama dan seimbang
di seluruh pelaku
industri media



komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital dan memberi manfaat serta nilai tambah bagi masyarakat.

Menurut Menkominfo, pemerintah menindaklanjuti usulan yang tertuang dalam *draft* tersebut untuk memastikan hilir atau *downstream* ruang digital kita punya *playing field* yang sama dan seimbang di seluruh pelaku industri media, baik prosedur teknologi maupun konvensional media untuk menjaga koeksistensi kehidupan media.

Penyesuaian Payung Hukum

Dukungan terhadap *Publisher Right* tidak saja pada saat menerima usulan draft. Pemerintah justru akan terus mengkaji secara spesifik usulan draft tersebut ditempatkan pada jenis regulasi yang sesuai.

Ada berbagai pilihan dari pemerintah dalam proses pengkajiannya. Antara lain menempatkan draft usulan *Publisher Right* setingkat Undang-Undang atau masuk dalam beberapa UU yang sudah ada. Seperti UU Persaingan Usaha, UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU Hak Cipta yang akan menjadi payung hukumnya. Jika tidak setingkat UU, pilihan lainnya dapat diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Cakupan pilihan tingkat payung hukum tersebut tentunya untuk memperkuat eksistensi pers dan media. terlebih di masa pandemi Covid-19, sebab di sektor konsumsi media terjadi pergeseran konsumsi media yang dinikmati oleh masyarakat. Menkominfo Johnny G. Plate menilai perubahan itu berangkat dari dampak pandemi yang menuntut masyarakat mengurangi pembatasan mobilitas dan aktivitas fisik, sehingga pemanfaatan ekosistem digital menjadi kian bertambah.

Tantangannya antara lain terkait dengan tren konsumsi media konvensional yang mengalami penurunan selama satu dekade terakhir dari tahun 2001 hingga 2011. Salah satu dampaknya terlihat dari konsumsi media cetak yang turun sebesar 50%, televisi 24%, dan radio 19%. Sedangkan media berbasis desktop justru semakin menunjukkan peningkatan konsumsi yang signifikan yakni sebesar 25% dan media berbasis seluler 460%.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa platform digital sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Namun tren kenaikan konsumsi pada platform digital tidak kemudian memberikan dampak buruk bagi eksistensi media konvensional.

Melalui draft usulan *Publisher Right*, pemerintah ingin media konvensional dan media baru *over the top* sama-sama berjalan beriringan, saling memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas di era transformasi digital merupakan sebuah keharusan.



Profil Singkat

Nama:
JH Philip Gobang

Jabatan:
Staf Khusus
Menkominfo
Bidang Komunikasi
Politik

Metaverse, Hanya Modifikasi Media Sosial Saja?

Devie Rahmawati

Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika

Metaverse menjadi *buzzword* yang cukup sering terdengar saat ini. Namun, sepertinya masih banyak yang belum menyadari bahwa *metaverse* telah secara perlahan bermetamorfosis menjadi 'media sosial baru.' Sejatinya, *metaverse* adalah dunia yang dimediasi internet dengan konsep platform media sosial dengan bumbu desentralisasi dan *blockchain*. Untuk memahami lebih baik apa itu *metaverse*, tolok ukur historisnya tentu kepada pemahaman Internet.

Dalam pengembangannya sejak akhir tahun 1980-an, Web mengalami kemajuan sangat pesat, terutama pada sisi *interface* (antarmuka). Usai mengembangkan *interface*, maka pengembangan program dan *database server* bisa dilakukan secara bersamaan. Sehingga kita pahami bahwa Web saat ini bisa ditambahkan atau dikembangkan sesuai dengan teknologi dan standar yang ada. *Hypertext* yang sudah ada akan menjadi data terbaru yang akan dihubungkan satu sama lain untuk menjadi sebuah data yang besar. Atau saat ini kita sebut sebagai *Big Data*. Dalam hal kelindan *Big Data* ini, media sosial menjadi penopang utama arus interaksi data di dunia digital.

Membahas *platform* media sosial tentu harus memulai dari perjalanan sejarahnya. Selama tahun 1970-an media sosial sudah mulai berkembang. Media sosial awal dikenal sebagai gim MUD atau *Multi-User Dungeon* atau *Multi-User Dimension*. Gim ini adalah dunia virtual dengan permainan *role-play*,



obrolan *online*, dan fiksi interaktif. MUD pada waktu itu didasarkan pada teks. Pengguna MUD perlu mengetik perintah bahasa pemrograman. Pada tahun 1978, BBS berkembang bersamaan dengan MUD. BBS atau *Bulletin Board System* dapat login untuk mengunggah unduhan perangkat dan membaca berita atau pesan. BBS di tahun-tahun awal media sosial dapat diakses *user* dengan menggunakan modem melalui saluran telepon pada satu waktu. Konsep interaksi sosial via BBS yang sangat spesifik ini nantinya diadaptasi *platform* media sosial.

Dalam ranah media sosial *online*, *user* saling berinteraksi dengan “gawai tatap muka” dari satu tempat ke tempat lain. Perangkat digital antarmuka ini umumnya mencakup layar tampilan dengan *keyboard* yang terhubung ke komunitas komunikasi digital melalui koneksi kabel Internet atau WiFi. Berbeda dari interaksi tatap muka di mana pertukaran verbal dilakukan dan dilangsungkan dengan penggunaan kehadiran dan perilaku *non-verbal*, interaksi tatap muka dalam *telecopresence* ditandai dengan perangkat tanpa tidak adanya kerangka nyata atau tubuh secara fisik.

Mari kita telaah lebih jauh konsep interaksi sosial di *platform* media sosial. Sejak masa awal media sosial terbentuk, struktur sosial di dalamnya telah melengkapi pembentukan koneksi, keterhubungan manusia, dan pembangunan jejaring. Situs web komunitas sosial merupakan contoh umum yang telah meningkatkan konektivitas antar manusia sebagai gaya hidup aktual dan juga membantu jejaring sosial luas dari ikatan yang rentan (*weak ties*). Ikatan rentan ini seperti ikatan pertemanan antar rekan kerja atau seorang kenalan. Model interaksi ini yang juga akan menjadi dasar dari *metaverse* yang populer ditemui.

Sebelum menggali lebih dalam apa itu *metaverse*, ada baiknya kita mengetahui apa saja hal-hal yang tidak terkait *metaverse*. Karena banyak orang sering mengaitkan *metaverse* sebagai bentuk turunan dari realitas *virtual reality* (VR). Hal ini bisa benar juga bisa kurang benar. Hal ini karena *metaverse* tidak terbatas pada dunia digital semata di mana dunia realitas virtual beroperasi. Di *metaverse* yang terjadi jauh melampaui konsep dan penggunaan VR semata. Seperti disinggung di awal, *metaverse* juga memiliki konsep interaksi ala media sosial.



***metaverse* adalah dunia yang dimediasi internet dengan konsep *platform* media sosial dengan bumbu desentralisasi dan *blockchain*.**



Walau di *metaverse* sendiri tren VR dan AR cukup gencar. Dengan *smartphone* yang jauh lebih canggih, dengan fitur AR (*augmented reality*). Hal ini membedakan trend dari *metaverses* tahun depan. Fitur ini menciptakan kesempatan untuk menerapkan konsep berbasis *metaverse* dengan basis *video game* menjadi dunia nyata. Proses ini akan mereplikasi ruang sosial atau objek dunia nyata di ruang digital. menang yang integrasi VR dan AR tentunya adalah perusahaan teknologi berbasis AR dan VR. Namun ada juga kecenderungan *cryptocurrency* juga memainkan peran penting dalam membentuk ruang *metaverse*.

Cryptocurrency berbasis *blockchain* telah mengaburkan perbedaan antara dunia digital dan fisik yang kita kenali. Revolusi *crypto* ini digagas oleh konsep Web 3.0. Konsep Web 3.0 sendiri diciptakan pada tahun 2014 oleh pendiri Ethereum dan pendiri jejaring Polkadot Gavin Wood. Konsep ini berangkat dari penentangan pada struktur internet saat ini. Alih-alih Internet atau Web 2.0 dikuasai mogul teknologi seperti Facebook, Google, dan Amazon bertindak dimana mereka memonetisasi, menyensor data, dan menyerang privasi pengguna secara sepihak. Di Web 3.0



semua konten dan data *user* akan dikendalikan oleh komunitas individu yang terdesentralisasi. *Metaverse* akan mendasarkan interaksi niaga pada model *blockchain* juga.

Anggapan umum lain bahwa *metaverse* disamakan dengan bentuk *amusement park* atau taman hiburan di ruang digital. Hal ini juga benar sebagian, tapi tidak sepenuhnya. Pada beberapa aspek seperti *interface* dunia digital, *metaverse* dapat memang memiliki ruang yang serupa dengan taman hiburan. Akan tetapi *metaverse* secara interaksi melampaui konsep tersebut. Lebih lagi karena konsep taman hiburan, yang digital sekalipun, terbatas karena fitur, *interface*, dan interaksi yang ditampilkan. Bahkan di dunia bisnis menganggap *metaverse* sebagai media untuk mereplikasi sebuah kantor dan lingkungannya yang sangat bergantung pada interaksi sosial untuk berfungsi.

Sementara *metaverse* terutama dipandang sebagai wonderland *virtual reality* (VR) di mana kita dapat menjalani fantasi *geekiest* kita dengan bermain game online. Ini bukan ide baru.

Beberapa orang mengasosiasikan konsep *metaverse* dengan gim online berbasis MMO (*massive multiplayer online*), seperti PUBG. Mereka cukup tepat memahaminya, karena konsep *metaverse* lumayan mirip dengan konsep MMO.

Banyak fitur *metaverse*, seperti memiliki identitas *user* tunggal di berbagai platform tertutup, membuat *user* dikenali karena kontennya. Hal ini mirip model aktualisasi diri di media sosial. Dan identitas tunggal ini menjadi pintu gerbang ke sejumlah besar fitur *metaverse*.

MMO dan *metaverse* memiliki sifat serupa tapi tak sama. Contohnya, *metaverse* memiliki mata uang juga, tapi tidak seperti mata uang seperti MMO yang telah ada. Beberapa gim online, seperti *EVE Online* atau *Second Life*, telah memiliki sistem mata uang di mana para *gamer* dapat “menghasilkan” uangnya sendiri. Kadang uang ini dapat membeli berbagai *skin* atau avatar di gim. Konsep *skin* (aksesoris karakter) dalam banyak gim online juga dimiliki baik MMO atau *metaverse*. Hal ini karena “memiliki” *skin* dan aksesoris pelengkap karakter lainnya sekarang sudah menjadi kian populer. Namun, *metaverse* mendorong konsep memiliki ini lebih jauh dengan sistem *blockchain*.

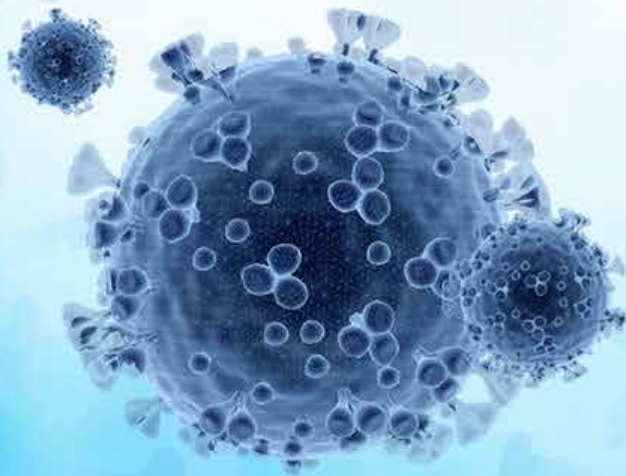
Meskipun untuk saat ini mendefinisikan *metaverse* cukup sulit, setidaknya penjelasan di atas cukup dapat merepresentasi fenomenanya. Sedang secara definisi, *metaverse* merupakan hamparan ruang digital yang sangat luas di mana *user* dapat berinteraksi satu sama lain secara *real time*. Dalam interaksi ini mereka berbagi pengalaman yang serupa dengan yang mereka alami di dunia nyata. Definisi *metaverse* ini menekankan poin penting yaitu *metaverse* sebagai hamparan dunia digital yang dapat dikatakan menjadi perpanjangan dunia nyata. *Metaverse* tak lain adalah media sosial dengan basis VR yang didukung sistem *blockchain*. Walau saat ini sayangnya, banyak perusahaan teknologi besar membuat ‘*metaverse*nya’ masing-masing.



Profil Singkat

Nama:
Devie Rahmawati

Jabatan:
Tenaga Ahli
Menteri
Komunikasi dan
Informatika



VARIAN OMICRON

**MENYEBAR LEBIH CEPAT
TAPI GEJALA RINGAN**

Varian Omicron menyebar lebih cepat dari varian COVID-19 lainnya, namun gejalanya lebih ringan dan cenderung tidak bergejala.



Jika positif namun tidak bergejala/bergejala ringan, jangan terburu-buru masuk rumah sakit



Utamakan isolasi mandiri dan jangan lupa untuk memanfaatkan layanan telemedisin jika tersedia atau lapor ke puskesmas terdekat

(Per 3 Februari 2022, layanan telemedisin dapat diakses di Jabodetabek, serta kota-kota besar di Jawa dan Bali)



Pilihan lain dengan isolasi terpusat di fasilitas yang disiapkan daerah masing-masing



Dengan isolasi mandiri, kita mengurangi beban rumah sakit dan tenaga kesehatan. Kita juga menyelamatkan orang lain dengan gejala lebih berat hingga kritis.



Tetap disiplin protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga



Segera lengkapi vaksinasi terutama bagi lansia dan anak-anak



Sumber foto : ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Pentingnya Pemanfaatan Teknologi Digital dan Pemulihan Pascapandemi di DEWG-G20



Salah satu ikhtiar Pemerintah Indonesia dalam menyambut G-20 adalah pemulihan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan ruang digital pascapandemi yang akan dibahas dalam *Digital Economy Working Group* (DEWG). Ikhtiar tersebut akan menjadi isu prioritas yang akan dibahas Kementerian Komunikasi dan Informatika pada DEWG. Sebagai konduktor di DEWG-G20, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo memberikan perhatian khusus terhadap isu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo sekaligus sebagai *Chair* DEWG Presidensi G20 Indonesia saat menghadiri Sofa Talk Series DEWG secara *hybrid*, dari Jakarta, Jumat 11 Februari 2022 yang lalu.

Menurut Mira Tayyiba, pembahasan isu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19 dilatari kondisi terkini, di mana pemanfaatan teknologi digital telah menjadi sebuah keniscayaan.

“Pandemi ini menegaskan kembali urgensi kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital. Saat mobilitas dan aktivitas fisik dibatasi, untuk bertahan dan berkembang, kita harus bermigrasi ke ruang digital. Ternyata ada kelompok adaptif yang bisa langsung memanfaatkan teknologi digital, dapat mengakses dan memanfaatkan. Namun, ada juga yang belum memiliki kesempatan ataupun akses ke layanan digital,” jelasnya.

Untuk itu, jelas Mira, kesenjangan akses digital menjadi perhatian khusus dalam mengangkat isu konektivitas dan pandemi dalam pembahasan DEWG, supaya Indonesia dan komunitas global dapat memperkecil kesenjangan akses teknologi digital.

“Kita ingin melihat apa yang disebut dengan kesenjangan, tidak saja terkait dengan keberadaan infrastruktur, tidak hanya masalah spasial. Ada daerah yang komersial, ada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang harus disediakan infrastruktur digital secara khusus,” tandasnya.

Lebih lanjut, Mira menjelaskan dinamika sektor strategis yang terus memanfaatkan teknologi digital selama pandemi Covid-19. Menurutnya, setiap pengampu kepentingan dalam sektor tersebut akan dilibatkan dalam pembicaraan Forum DEWG Presidensi G20 Indonesia 2022.

“Misalnya, aktor yang paling terdampak pandemi yaitu UMKM. Mereka bisa tumbuh dan berkembang di era pandemi dengan bermigrasi ke platform digital. Bisa dilihat bahwa bentuk pemanfaatan teknologi digital ini sangat beragam dan sepatutnya dapat dimanfaatkan banyak pihak,” ujarnya.

Ajak Anggota ASEAN

Selain berbicara tentang konektivitas digital dalam negeri, Indonesia juga memberi perhatian khusus terhadap perkembangan digitalisasi di kawasan

Asia Tenggara (ASEAN). Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengajak negara anggota ASEAN agar mendukung agenda Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Ajakan tersebut disampaikan Mira Tayyiba saat Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Forum The 2nd ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN-2), yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Kamis 27 Januari 2022. Dalam momen tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Koinfo Mira Tayyiba menyatakan Presidensi G20 Indonesia mengusung agenda Recover Together, Recover Stronger.

“Indonesia sangat senang dan merasa terhormat untuk membawa agenda transformasi digital di forum G20. Presidensi G20 Indonesia akan berfokus pada tiga isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi,” ujarnya.

Menurut Mira, perkembangan sektor digital di kawasan ASEAN terutama sepanjang pandemi Covid-19 terus mengalami peningkatan. Negara anggota ASEAN telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam mendorong pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia menjelaskan, Pentingnya peran teknologi digital, dalam mengakselerasi pemulihan pasca pandemi Covid-19 tercermin dalam ASEAN *Comprehensive Recovery Framework* (ACRF) yang menggarisbawahi pentingnya transformasi digital yang inklusif.

“Transformasi digital harus inklusif agar manfaat positif dan produktif dari ruang digital dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali,” tuturnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Mira menegaskan, Pemerintah Indonesia siap untuk memperkuat kolaborasi dan kohesivitas kerja sama negara anggota ASEAN untuk mencapai pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

“Perlu diingat bahwa pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan transformasi digital harus berjalan beriringan. Melalui penguatan kerja sama regional di bidang digital, ASEAN dapat merealisasikan peluangnya untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat,” paparnya.



Wujudkan Pers Sehat
dan Bermartabat,

Pemerintah Bahas *Fair Level Playing Field*
di Tengah Gempuran Platform Digital



Setiap tahunnya, seluruh insan pers Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari. Konon, sejak tahun 1985 silam, HPN menjadi peringatan rutin tahunan melalui Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh mantan Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari di tahun tersebut. Tanggal itu pula bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa pers Indonesia memiliki sejarah perjuangan dan peranan penting melaksanakan pembangunan pengamalan Pancasila. Melalui hal tersebut, Dewan Pers kemudian menetapkan HPN dilaksanakan setiap tahun dengan tema berbeda-beda secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia. Tahun ini, peringatan HPN 2022 diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pada peringatan HPN 2022, pers Indonesia masih dihadapkan pada tantangan zaman yang tidak ringan. Bukan lagi tekanan penggalan informasi yang mendapatkan pembatasan dari kelompok tertentu. Tantangan itu justru lebih banyak dari faktor luar, tepatnya dampak dari sebuah disrupsi teknologi digital.

Ini sebenarnya bukan sepenuhnya persoalan baru. Sejak era media *platform* digital menyeruak hebat pada kurun 10 tahun terakhir, pers Indonesia faktanya dipaksa berjalan dalam situasi tak nyaman. Bahkan, tak jarang belepotan sehingga berujung mereka sebagian berguguran.

Datangnya beragam platform media sosial pun terbukti sempat mengganggu pers Indonesia. Merujuk Survei Status Literasi Digital Indonesia 2021, 73% masyarakat menjadikan media

sosial sebagai sumber informasi yang paling sering diakses. Relasi antara pers Indonesia dengan *platform* digital yang belum terurai hingga kini tentu menjadi keprihatinan. Ditambah lagi, solusi yang muncul mungkin efektif pada satu pihak, tetapi tidak bisa atau sulit diterapkan pada institusi yang lain.

Kondisi ini bertambah kompleks seiring dengan adanya sebagian institusi maupun insan pers yang hanya mengedepankan strategi bar-bar dalam kerja keredaksian. Ini setidaknya ditandai dengan maraknya fenomena berita yang berbasis *clickbait*, bombastis, bahkan cenderung lemah dukungan fakta dan data.

Oleh karena itu, Pemerintah mendukung upaya Dewan Pers dan komunitas media menciptakan ekosistem dengan kompetisi yang adil (*fair level playing field*) melalui pengaturan hak penerbit (*publisher rights*) sebagai salah satu strategi yang ampuh untuk menghadapi gencetan disrupsi digital itu. Pengaturan itu akan dapat menciptakan jurnalisme berkualitas yang sehat secara ekonomi.

Untuk mengetahui lebih lanjut pembahasan mengenai aturan yang akan ditetapkan, Pemerintah bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia mendiskusikan hal ini dalam peringatan HPN 2022.



Peringatan Hari Pers Nasional 2022 mengusung tema “Sultra Jaya, Indonesia Maju”. Isu mengenai kelestarian lingkungan hidup menjadi pembahasan utama yang dalam penyelenggaraan tersebut. Melansir laman Persatuan Wartawan Indonesia, penyelenggaraan HPN kali ini bertujuan untuk menyuarakan kepentingan nasional, membahas isu tentang pers nasional serta berkontribusi pada pembangunan di daerah.

Selain itu, beragam isu lainnya yang dibahas dalam rangkaian kegiatan HPN tahun ini yaitu konvensi media massa pariwisata bangkit, seminar energi dan pertambangan, seminar moneter dan fiskal, serta diskusi mengenai Anugerah Jurnalistik Adinegoro. Sedangkan khusus untuk lokakarya (*Workshop*)

jurnalistik, serentak digelar dari empat tempat berbeda secara *hybrid*, yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Sulawesi Tenggara, London School Public Relation (LSPR) Jakarta, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Monumen Pers Surakarta. Kesemuanya dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 7 s.d 8 Februari 2022.

Namun, mengingat terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 karena munculnya varian Omicron di Indonesia sejak awal 2022, panitia penyelenggara Hari Pers Nasional memutuskan untuk melaksanakan peringatan HPN ke-76 pada tahun ini secara hibrida.

Dalam Puncak Hari Pers Nasional 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (9/02/2022), didampingi Menkominfo, Johnny G. Plate; dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Melalui tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden dan Kemkominfo TV, Kepala Negara menyatakan Pemerintah siap memberikan dosis vaksinasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tanpa batas guna meningkatkan imunitas tubuh sehingga meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19 dan varian baru Omicron.



Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun berada. Meskipun berada dalam situasi pandemi, insan pers tetap bekerja, terus menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, membangun optimisme dan membangun harapan sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak Covid-19



“Tadi Pak Atal Depari (Ketua PWI) menyampaikan mengenai urusan vaksin yang saat itu dari PWI meminta untuk didahulukan dan saat itu memang kami hanya bisa memberikan 5.000 dosis,” kata Kepala Negara.

Namun demikian, apabila PWI masih meminta lagi, Pemerintah siap memberikannya karena masih ada stok 143 juta vaksin untuk disuntikkan. “Jadi Bapak mau minta berapa akan saya beri, sekarang juga,” ujar Presiden Joko Widodo menambahkan.

Presiden juga menyebut, saat ini cakupan vaksinasi telah mencapai di angka 325 juta baik dosis pertama, kedua maupun dosis penguat atau *booster*. Di kesempatan

ini pula, Presiden mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada seluruh Insan Pers Indonesia di mana pun berada. Meski masih berada dalam situasi pandemi, dia juga meminta kepada para pekerja media untuk tetap bekerja menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, dan optimistis dalam membangun harapan.

“Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun berada. Meskipun berada dalam situasi pandemi, insan pers tetap bekerja, terus menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, membangun optimisme dan membangun harapan sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak Covid-19,” ucapnya.

Lakukan Transformasi

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa industri pers di Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan yang luar biasa berat. Ditambah lagi akibat disrupsi digital kencang dalam satu dekade terakhir, serta tekanan dari platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi.

Menyikapi hal tersebut, Presiden meminta industri pers nasional untuk bertransformasi dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Hal itu bertujuan supaya pers bisa makin inovatif untuk mengatasi tekanan akibat disrupsi digital. Dia mendorong media-media *mainstream* atau arus utama untuk segera melakukan melakukan hal serupa.

“Transformasi itu diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan media nasional yang sehat. Saya tahu, dalam 2 tahun terakhir industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa beratnya untuk mengatasi tekanan akibat pandemi Covid-19, disrupsi digital, dan juga tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama,” ungkapnya.

Presiden melihat tantangan media arus utama kini semakin besar karena kehadiran teknologi. Perubahan drastis lanskap tersebut menimbulkan beberapa persoalan seperti munculnya sumber-sumber informasi alternatif dan tren informasi yang semata mengejar jumlah viewers semakin tumbuh subur, sehingga menyebabkan masyarakat memiliki sumber informasi alternatif. Bedanya, informasi tersebut tidak lebih dulu melalui proses verifikasi.

“Kemudian, ditambah lagi dengan membanjirnya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi menyesatkan, bahkan cenderung adu domba hingga menimbulkan kebingungan dan perpecahan,” tuturnya.

Oleh karena itu, pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa Indonesia. Kepala Negara juga ingin insan pers tidak terjebak dengan sikap pragmatis yang menggerus integritas. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan dengan menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan, mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat.

“Harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan *platform-platform* dengan berita-berita baik dan mencerdaskan, dan mengisi konten-konten yang berkualitas, dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang- peluang yang ada,” jelas orang nomor satu di Indonesia ini.

Kemudian, melalui laman Instagramnya @Jokowi, Presiden menuliskan pesan seraya mengunggah foto ilustrasi tentang pers dan berisi tulisan ‘Selamat Hari Pers Nasional’, yang dilanjutkan dengan kalimat ‘berita dan informasi datang silih berganti, tak kenal ruang dan waktu. Belum tuntas berita awal dicerna sudah ada berita baru’.

“Sebuah kabar belum tuntas dicerna, telah muncul kabar-kabar baru dari berbagai

penjuru. Dari linimasa dan grup-grup percakapan, tautan-tautan di belantara dunia maya, juga yang beredar dari mulut ke mulut,” ujarnya.

Presiden menilai pers merupakan pegangan dalam memilih informasi di tengah belantara informasi, sehingga dia berharap pers terus mendorong kemajuan dan pers menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya.

“Beruntunglah kita masih punya sumber informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Keberadaan pers nasional membuat kita memiliki pegangan dan panduan dalam memilih informasi yang bermutu, mencerdaskan, dan mendorong kepada kemajuan,” ungkapnya.



Menurutnya, solidaritas menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi pandemi untuk menunjukkan ketangguhan, kekuatan, kekompakan, persatuan, dan gotong-royong.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ada beberapa pilihan yang dapat segera ditempuh untuk mengatasi persoalan yang muncul bagi media. Diantaranya yaitu mendorong undang-undang yang baru, merevisi undang-undang yang lama, atau mengeluarkan peraturan pemerintah.

“Kita akan perkuat aturan bagi hasil yang seimbang antara *platform* global dan lokal. Jadi, ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera diputuskan, apakah segera mendorong undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah,” paparnya.



Terima Saran

Kepala Negara menjelaskan, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Dalam mengerjakan kerja besar transformasi bangsa, lanjutnya, Pemerintah menyadari bahwa kerja besar transformasi bangsa ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, pemerintah selalu terbuka menerima masukan masukan dari insan pers.

Pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari para insan pers agar langkah besar tersebut benar tereksekusi, sehingga membawa perubahan bagi kemajuan Indonesia. Mengingatkan jika ada yang kurang dan perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik agar seluruh jajaran pemerintah bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia maju,” tandasnya.

Presiden juga menyatakan Indonesia telah beberapa kali menjadi tuan rumah acara berskala internasional. Sejumlah agenda penting akan berlangsung dan pers diharapkan mampu menyukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan informasi yang positif.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga yang kita miliki dengan mengabarkan kabar baik dan kabar kebaikan, menunjukkan ketangguhan dan kekuatan kita, kekompakan, persatuan, gotong royong, solidaritas yang menjadi modal penting kita dalam menghadapi pandemi,” ujarnya.

“Orientasi industri media yang baik akan tercermin dari jurnalisme yang berkualitas berbasiskan data, analisis dan pendekatan teoritis yang memadai”

Adaptasi Teknologi Digital

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan kemajuan dan disrupsi teknologi yang terjadi selama pandemi Covid-19, akan terus memengaruhi proses bisnis industri media konvensional dan media mainstream Indonesia

“Saat ini terjadi pergeseran konsumsi media di kalangan masyarakat selama satu dekade terakhir. Kondisi itu terlihat dari tren penurunan konsumsi media konvensional dari tahun 2011 sampai tahun 2021,” jelasnya saat menghadiri hari kedua Konvensi Nasional HPN 2022: Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan, yang berlangsung secara hibrida dari Phinisi Room Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/02/2022).

Menkominfo menyatakan, di era digital, kemajuan teknologi berupa *big data*, *artificial intelligence*, dan *Metaverse* dapat memperkaya kebutuhan data serta analisis untuk produksi dan distribusi konten industri media.

“Orientasi industri media yang baik akan tercermin dari jurnalisme yang berkualitas berbasiskan data, analisis dan pendekatan teoritis yang memadai,” ujarnya.

Menurut Menkominfo dunia terus didorong untuk melakukan transformasi digital di tengah berbagai keterbatasan yang timbul akibat pandemi Covid-19. Hal itu juga penting dilakukan insan pers agar bisa menemukan model bisnis baru media.

“Perubahan besar yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi digital menjadi orientasi, sekaligus solusi yang dapat menembus keterbatasan, memperluas perspektif dan jangkauan. Sekaligus mempercepat proses di berbagai lini kehidupan, tentunya termasuk di industri media,” jelasnya.

Menteri Johnny juga menjelaskan perkembangan *Metaverse* yang memungkinkan kemunculan model bisnis baru industri media. Sebagai gambaran, Menkominfo menyatakan pada tahun 2003 telah muncul *platform second life*, yakni komunitas *virtual online* yang memungkinkan pengguna membuat avatar dan berinteraksi di dunia *virtual*.

Dalam *platform* itu, menurut Menteri Johnny hadir *The Second Life Environment*, yaitu surat kabar *online* yang memungkinkan pemilik dan pembuat bisnis virtual untuk mengiklankan layanan atau produk mereka kepada konsumen di dalam *platform second life*.

“Hal ini dilakukan melalui pembelian tempat iklan yang dapat diubah menjadi artikel dan siaran pers,



di mana pendapatan dan akan diperoleh melalui pembayaran yang dilakukan via papan iklan yang terdapat di *sport virtual* perusahaan dengan mata uang yang berlaku pada *platform* tersebut," tuturnya.

Menkominfo menyatakan saat ini terjadi pergeseran konsumsi media di kalangan masyarakat selama satu dekade terakhir. Kondisi itu terlihat dari tren penurunan konsumsi media konvensional dari tahun 2011 sampai tahun 2021.

Berdasarkan catatan dari *bandwidth, record, and risky time* tahun 2021, Menteri Johnny memaparkan, konsumsi media cetak turun sekitar 50%, media televisi sekitar 24%, radio sekitar 19%. Di sisi yang lain, media berbasis desktop mengalami peningkatan konsumsi sebesar 20%, dan bahkan media berbasis seluler naik sebesar lebih dari 460%.

Sementara di sektor produksi, sebanyak 75% eksekutif perusahaan global bidang komunikasi, jurnalisme, dan media massa menunjukkan adanya kebutuhan untuk berinovasi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

"Sebagai salah satu industri yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 dan disrupsi teknologi digital, 86% dari para eksekutif tersebut percaya bahwa untuk bersaing di dunia yang serba digital dibutuhkan strategi bisnis yang memposisikan audiens serta pelanggan sebagai mitra kerja," jelas Menkominfo.

Menteri Johnny menyatakan, pertumbuhan arus data yang juga semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan identifikasi, serta menasar khalayak dengan lebih akurat. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan memudahkan perusahaan untuk membangun personalisasi produk, serta layanan bagi audiens yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

"Saat ini di Indonesia pun kita melakukan *roll out* dan *deployment* 5G untuk merespons munculnya beragam teknologi, serta media digital yang baru misalnya *metaverse, cloud computing*, yang akan semakin mendorong pergeseran produksi maupun konsumsi di bidang komunikasi jurnalisme dan media," tuturnya.



Dorong Media Massa Eksplor Metaverse

Pada hari pertama penyelenggaraan Konvensi Nasional HPN, yang dilaksanakan sehari sebelumnya, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan selain pertumbuhan media online sudah sangat cepat dan pesat, kini muncul lagi Metaverse yang bukan tidak mungkin akan kembali memberi tekanan pada industri media.

"Dulu tahun 70an kita mengenal kata internet sesuatu yang baru, nah mungkin *metaverse* ini seperti itu nantinya. Setelah teknologi berkembang, mengeksplor wilayah yang selama ini belum yaitu wilayah cyber, wilayah imajiner," tuturnya.

Nuh melanjutkan, media dan siapapun yang tak mau mengeksplor wilayah *cyberspace* maka akan kembali ketinggalan jaman. Oleh karena itu, dia menyarankan agar media massa, segera mempersiapkan untuk bermigrasi dari fisik ke online atau bahkan keduanya. "Paling tidak, kita memasuki *hybrid*, kombinasi antara ruang fisik dan *cyber*," jelasnya.

Ia menambahkan, jika media telah bermigrasi ke dua ruang ini maka tidak hanya akan mampu bertahan tapi juga menjadi pemain penting.

"Kami sangat yakin, insan pers bisa menjadi mesin melakukan perubahan tersebut. Sebab bukan hanya yang kuat bertahan atau yang pintar. Tetapi siapa yang mampu melakukan," tutur mantan Menteri Pendidikan itu.

Kendalikan Arus Jurnalistik

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Atal S Depari mengajak komunitas pers di Indonesia untuk menjaga kualitas jurnalistik dengan menghindari berita *clickbait*. Dia menyoroti tiga hal yang harus dijaga oleh komunitas pers. "Komunitas pers nasional perlu mawas diri dan berbenah diri. Pers mesti mengendalikan arus jurnalistik, *click bait* yang semakin deras, khususnya pada jalur jurnalisme *online*," tandasnya.

Lebih lanjut, Atal menjelaskan kualitas produk jurnalistik Indonesia harus terus berbenah diri. Sebab, media harus bisa menghadirkan kualitas produk jurnalistik yang berkualitas, bukan sekadar bombastis. Menurutnya, pers harus terus memperbaiki kualitas berita dengan menghindari tren pemberitaan yang bias dan provokatif.

"Sedapat mungkin menghindari tren pemberitaan yang bias, yang provokasi, yang bombastis atau tidak tajam. Pers mesti mengendalikan arus jurnalistik *clickbait* yang makin deras, khususnya pada jalur jurnalisme *online*," katanya.

Menyoal independensi media, Atal menyampaikan saat ini masih banyak media yang bersifat partisan, khususnya di momen pemilihan umum.

"Kita harus mengakui dalam pemilu atau pilkada, masih ditemukan media partisan. Mari bersama-sama kita mawas diri dan memperbaiki itu," tambahnya.

Oleh karena itu, Atal menyatakan wartawan perlu mewujudkan *publisher rights* atau kemandirian media di hadapan *platform* digital. Ia menilai, dalam mewujudkan hal itu dibutuhkan soliditas dari para pelaku usaha media di Indonesia.

"Dalam rangka mewujudkan *publisher rights* atau kemandirian media di hadapan *platform* digital dibutuhkan soliditas dan kekompakan antarmedia inilah tantangan kita sekarang ini. Apakah media-media besar solider terhadap media-media kecil? Apakah media kecil juga bisa menempatkan diri secara proporsional dan tidak banyak mau, tetapi tidak mau bekerja keras?" katanya.

Atal juga meminta semua elemen pers di Indonesia agar seiringan dalam mendorong *publisher rights* sebagai UU. Dia berharap tidak ada satu pihak yang merasa elitis dibandingkan pihak lain dalam mendorong regulasi *publisher rights*.

"Dibutuhkan soliditas di sini. *Publisher rights* atau regulasi semacamnya harus melindungi semua media. Media besar maupun kecil, media nasional maupun media daerah. Dalam konteks ini asosiasi-asosiasi media harus bisa adil dan melindungi seluruh kepentingan media yang menjadi anggota, tidak elitis, tidak eksklusif. Tetapi, mengayomi seluruh anggotanya," tuturnya.

Rekomendasi Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022

Konvensi yang berlangsung selama dua hari ini mempertemukan berbagai *stakeholder* dari kalangan media, pemerintah, pelaku usaha di bidang digital maupun pengamat. Konvensi media ini pada hakikatnya bertujuan memetakan persoalan sekaligus mendiskusikan jalan keluar yang dihadapi bangsa Indonesia secara keseluruhan maupun komunitas media secara khusus berkaitan dengan bagaimana mengubah tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital menjadi peluang yang menguntungkan bangsa dan mempertahankan kelangsungan media sebagai pilar penting demokrasi.

Menurut Tim Perumus Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 yang terdiri dari delapan orang anggota yakni Agus Sudibyo, Eduard Depari, Kemal Effendi Gani, Frans Surdiasis, Neil



Tobing, Wenseslaus Manggut, Candi Sinaga, dan Christina Chelsea, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 mendorong negara untuk secara sistematis dan berjangka panjang merumuskan kebijakan yang mengarah pada terbangunnya kedaulatan nasional di bidang digital.

“Hal ini bersifat mendesak untuk melindungi kepentingan Indonesia di tengah derasnya transformasi digital yang terjadi di semua bidang. Dalam arti kepentingan ekonomi, kepentingan politik maupun kepentingan alih teknologi,” tegas Tim Perumus melalui kanal YouTube Dewan Pers.

Selanjutnya, dalam konteks kedaulatan nasional guna membangun ruang publik yang sehat, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 merekomendasikan agar Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat kehadiran regulasi *Publisher Right* maupun regulasi lain yang memiliki tujuan membangun kemandirian atau kedaulatan digital.

Regulasi semacam ini merupakan upaya melindungi kepentingan nasional Indonesia menghadapi dominasi platform global dan pada saat yang sama mewujudkan kedaulatan nasional

dalam membentuk ekosistem media yang mampu menjalankan peran demokratisnya secara lebih baik.

“Namun perlu ditegaskan, perlu kehati-hatian agar *Publisher Right* dan regulasi semacamnya tidak mereduksi sisi-sisi positif digitalisasi. Pada prinsipnya, perlu dihindari regulasi berlebihan (*over regulation*) yang justru menghalangi optimalisasi segi-segi demokratis, deliberatif, produktif dan kreatif dari transformasi digital,” kata Tim Perumus.

Tim perumus Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 menyampaikan ada lima saran keyakinan untuk membangun keberlanjutan media massa dalam jangka panjang dengan memerlukan kemandirian yang kuat.

Pertama, pers Indonesia harus menyeimbangkan antara model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan programatik dengan model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan langsung. Model bisnis yang bertopang pada periklanan programatik juga mendorong media untuk menjalankan praktik jurnalisme yang terlalu berorientasi pada *shareability*, kepada kuantitas berita, dan cenderung mengabaikan persoalan



kualitas dan kepatutan jurnalistik. Periklanan programatik juga bisa berdampak negatif terhadap *brand recognition* perusahaan media di mata pengiklan.

Kedua, pers Indonesia harus menyeimbangkan akses langsung pengguna ke website media dengan akses tidak langsung pengguna yang difasilitasi *platform* media sosial, mesin pencari atau agregator berita.

Akses langsung ke media bagaimanapun menggambarkan kekuatan *brand* media dan kekuatan *brand* inilah yang perlu dibangun guna menopang kapasitas bisnis jangka panjang media massa. Sedangkan akses pengguna melalui perantara platform media sosial, mesin pencari atau agregator berita memang diperlukan untuk menaikkan trafik atau *leverage website* media.

Namun, ketergantungan berlebihan terhadap *platform digital* ini membuat *website* media sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan sistem algoritma yang secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan dilakukan platform digital.

Ketergantungan terhadap *platform digital* dalam mendistribusikan konten dalam jangka panjang juga dapat membuat media mengalami krisis *brand recognition* di hadapan khalayaknya, serta

kehilangan peluang terbaik untuk mengumpulkan dan mengelola data pengguna secara mandiri dan prospektif untuk mode periklanan yang lebih efektif.

Ketiga, penting bagi media massa Indonesia untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan langsung dengan kalangan pengiklan dan khalayak pengguna. Media massa harus menjadi pihak yang kredibel, mandiri, dekat dan terpercaya di mata pengiklan dan khalayak.

Keempat, komunitas media massa di Indonesia harus secara bersama-sama mempertimbangkan inisiatif-inisiatif kolaborasi antar media. Kolaborasi pendistribusian dan monetisasi konten terkurasi, kolaborasi penambangan dan pengelolaan data pengguna secara integratif, serta kolaborasi untuk mengendalikan arus disinformasi dan hoaks yang meresahkan masyarakat atau memecah-belah bangsa.

Kolaborasi ini sangat penting untuk mereservasi jurnalisme berkualitas di era epidemi disinformasi, serta untuk bersama-sama membangun model bermedia yang berkelanjutan.

Kelima, komunitas pers Indonesia harus kembali kepada khittah sebagai kekuatan keempat demokrasi dan ruang publik yang beradab.

Untuk itu, berpegang teguh kepada jurnalisme berkualitas atau jurnalisme publik adalah mutlak harus dilakukan. Untuk menghindari tekanan disrupsi, media massa harus bisa menghadirkan sesuatu yang sulit ditemukan publik di jagat media baru.

Di jagat media baru, kebaikan dan keburukan informatif bercampur-baur, berita yang benar dan kabar bohong berkelindan sedemikian rupa. Hal yang sulit diperoleh publik dari jagat media baru itu adalah, kebaikan yang telah dipisahkan dari keburukan, kebenaran yang telah dilepaskan dari kabar bohong. Jurnalisme berkualitas jelas menjadi solusi di sini.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kembali kepada khittah jurnalisme berkualitas bukan hanya soal idealisme pers, tetapi juga soal bagaimana menyelamatkan diri dari gelombang disrupsi.

Secara keseluruhan, Konvensi Nasional Media HPN 2022 menitikberatkan agar jurnalis berpegang teguh terhadap jurnalisme berkualitas. Untuk menghindari tekanan disrupsi, media massa harus mampu menghadirkan sesuatu yang sulit ditemukan di publik namun dapat ditemukan di jagat media baru.



Kebaikan serta keburukan informatif bercampur baur, sehingga berita yang benar ataupun berita bohong saling bertautan tanpa bisa dibedakan. Untuk itu, perlu kebaikan yang telah dipisahkan dari keburukan serta kebenaran lain yang telah dilepaskan dari kabar bohong demi mewujudkan kepercayaan publik terhadap media massa.

Hadir secara langsung dalam acara puncak HPN 2022 di Pelataran Masjid Al-Alam, Kendari, Sulawesi Tenggara antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali; Kadiv Humas Polri,

Dedi Prasetyo; Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo; serta tokoh-tokoh pers nasional.

Sementara itu, hadir secara virtual yakni Direktur Jenderal IKP Kementerian Kominfo, Usman Kansong; Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin; Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa; serta para Menteri Kabinet Indonesia. (hm.ys)

Referensi :

<https://www.pwi.or.id/detail/2042/Kesimpulan-dan-Rekomendasi-Konvensi-Nasional-Media-Massa-HPN-2022-Kendari-Sulawesi-Tenggara-7-8-Februari-2022>

Konvensi Nasional Media Massa, HPN 2022 https://youtu.be/aa3si084_ho, <https://youtu.be/HXXSGu0gWK4>

Siaran Puncak Peringatan Hari Pers Nasional <https://www.youtube.com/watch?v=Eok5p57erH4>



Peran Kominfo Jawab Peluang Indonesia Masuk 10 Besar Ekonomi Global

Ekonomi merupakan sektor kebutuhan paling dasar bagi setiap manusia. Dalam ruang lingkup suatu negara, daya kuat dan sejauh mana sektor ini bertahan, ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berlandaskan pada cita-cita bangsa. Melalui kekuatan ekonomi, negara-negara maju dan berkembang tentunya akan mengambil peran strategis. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara berkembang dan menuju negara maju, apakah perekonomian nasional akan turut mempengaruhi perekonomian global?

Menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat optimis bahwa melalui tata kelola pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia akan menjadi satu dari 10 negara di dunia dengan prospek ekonomi terbesar. Tentu ini tidak sekadar ucapan dan narasi. Dari berbagai data dan kebijakan yang terus dilakukan, ekonomi nasional akan terus mengalami peningkatan seiring ekosistem teknologi menjadi pondasi utama.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam dialog Media Group Network Summit 2022 secara virtual menyatakan, peluang Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi di tingkat global dapat dilihat dari capaian-capaian pemerintah. Salah satunya, kontribusi 40% bagi ekonomi digital di ASEAN dan Produk Domestik Bruto atau GDP yang ditopang oleh 60% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, visi digital Indonesia masuk 10 besar ekonomi global adalah realistis. Karena pada dasarnya perekonomian nasional berskala besar dengan prospek yang juga sangat besar dan akan menjadi akseleratif pada saat sumber daya manusianya didorong untuk bermigrasi ke dunia digital.

Ketika masyarakat Indonesia telah beradaptasi dengan industri teknologi digital, para pelaku UMKM juga siap untuk memanfaatkan berbagai

platform digital yang ada (digital onboarding). Maka tentunya, akselerasi ekonomi digital dari sisi UMKM sangat tinggi dan sangat cepat. Upaya tersebut belum termasuk dukungan pemerintah yang terus mendorong perusahaan dalam negeri yang berbasis digital, baik yang masih berskala menengah dan perusahaan ternama untuk tumbuh dan berkembang menjadi startup dengan level *unicorn* maupun *decacorn*.

Seperti diketahui, *startup* karya anak bangsa saat ini hanya dua yang berstatus *decacorn* yakni Gojek dan J&T Express. Oleh karena itu, Menteri Johnny menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan lainnya dari aspek regulasi yang mudah dan ramah terhadap investasi.

Di balik dukungan multi sektor untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian nasional, sektor yang sebenarnya memainkan peran penting adalah sektor komunikasi dan informatika. Menteri Kominfo dalam hal ini menegaskan, tanpa adanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi yang masif, maka Indonesia hanya bisa menjadi penonton. Padahal sebagai negara dengan kekuatan populasi terbesar keempat di dunia, potensi Indonesia sebagai negara maju sudah seharusnya ada dalam genggamannya. Hanya saja, disparitas sosial atau kesenjangan masih menjadi masalah utama, terlebih kesenjangan dalam pelayanan akses telekomunikasi.



Oleh karenanya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, penggelaran infrastruktur TIK terus dilakukan dengan tetap memperhatikan serta memastikan hilirisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Di sisi lain, Menkominfo Johnny G. Plate akan terus mendorong partisipasi sektor privat untuk secara bersama-sama menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas ketika layanan telekomunikasi merata di seluruh tanah air.

Program Stimulus Kominfo

Menyoal optimisme Indonesia masuk sebagai 10 negara ekonomi global, dukungan terhadap pelaku UMKM yang menyumbang 60% PDB nasional terus ditingkatkan. Tentu tidak ada pilihan lain selain memberikan kebijakan keberpihakan agar UMKM *digital onboarding*. Untuk mendukung sektor ini, Menkominfo Johnny G. Plate menyiapkan program-program stimulus salah satunya melalui program UMKM Go Digital dan berbagai pelatihan pendukung.

Selain program yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo, program nasional yang disediakan untuk mendorong *off taking* terhadap produk-produk UMKM adalah program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Menteri Johnny menyatakan bahwa BBI telah dan akan terus dilaksanakan secara masif oleh seluruh kementerian dan lembaga. Hal itu untuk memastikan produk dalam negeri diproduksi dengan baik dan bisa menggunakan marketplace secara memadai.

Secara pribadi dan atas nama pemerintah, Menkominfo telah memanggil dan menyampaikan kepada setiap penyelenggara sistem elektronik dan *platform* digital agar mengutamakan produk-produk lokal, produk UMKM dalam negeri. Jangan

sampai, pasar domestik diisi oleh produk UMKM bangsa-bangsa lain. Ketegasan tersebut diperkuat dengan membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang melibatkan semua pelaku industri, khususnya *platform* digital.

Menteri Johnny menilai Forum Ekonomi Digital Kominfo sebagai wadah diskusi untuk menghasilkan kebijakan yang progresif dan inklusif. Forum itu sendiri telah beberapa kali digelar yang membahas mengenai *e-commerce*, *ride hailing* dan *e-health*. Tentu urgensi pada sektor lainnya akan terus dibahas dan didiskusikan bersama mitra sektor.

Selain program yang disiapkan untuk memompa semangat pelaku UMKM lokal, Menkominfo Johnny G. Plate juga menghadirkan program stimulus dalam mengembangkan SDM digital. Komitmen besar itu dilakukan dengan membagi tiga tingkatan program pelatihan, dimulai dari tingkat basic melalui Gerakan Literasi Digital Nasional (GNLD), tingkat menengah melalui pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) dan tingkat atas melalui pelatihan Digital Leadership Academy (DLA).



Untuk tingkat *basic*, Menteri Johnny menjelaskan program GNLD yang didukung dengan APBN yang memadai menargetkan sebanyak 50 juta masyarakat terliterasi hingga tahun 2024. Setiap tahunnya, program ini menasar 12,5 juta masyarakat untuk memahami empat pilar *digital basic* yakni *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety* dan *digital culture*.

Sedangkan pelatihan tingkat menengah melalui program DTS dan program tingkat lanjutan atau DLA, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra terbaik berskala nasional hingga internasional. Program DTS sendiri bekerja sama dengan lebih dari 100 universitas dan politeknik di Indonesia. Sedangkan program DLA bekerja sama dengan empat perguruan tinggi ternama di dunia antara lain University of Singapore, Tsinghua University, Oxford University dan Harvard Kennedy School.

Menteri Johnny menegaskan bahwa program-program tersebut dihadirkan kepada masyarakat dalam rangka agar ekosistem digital tidak terkonsentrasi hanya di pusat-pusat perekonomian atau di kota besar. Tetapi harus terdistribusi lebih merata ke seluruh wilayah tanah air. Karena upaya tersebut satu tarikan napas dengan kebijakan Presiden untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pusat-pusat pertumbuhan tradisional.



Manifestasi Transformasi Digital Kominfo: Antara Etos Kerja dan Komitmen

Disiplin dan etos kerja yang tinggi sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya sebuah organisasi. Terlebih era keterbukaan informasi dan adaptasi teknologi yang kian menyentuh aktivitas masyarakat memiliki pengaruh tersendiri. Dalam sebuah organisasi, manajemen dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan. Demikian halnya, kerja kolaborasi dan membentuk persepsi yang sama demi tujuan organisasi menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan.

Dalam mengawal sebuah organisasi agar dapat beradaptasi dengan teknologi dan era transformasi digital, salah satu penopang penting adalah sumber daya manusia di dalamnya. SDM yang terampil, etos kerja dan komitmen yang tinggi, merupakan manifestasi yang sangat penting.

Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat mengukuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya kepada tiga Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo, yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; Usman Kansong, dan Staf Ahli Menteri; Henri Subiakto.

Selain itu, Menteri Johnny dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kominfo juga menandatangani Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (PK dan SKP). Melalui momentum tersebut, Menkominfo menekankan bahwa

pengukuhan JPT Madya dan PK dan SKP Eselon I Kementerian Kominfo merupakan bagian dari komitmen mewujudkan transformasi digital nasional.

Kepada seluruh civitas, Menteri Johnny menyatakan pengukuhan JPT Madya dan PK dan SKP Eselon I bukan semata menjadi simbol. Sebab, Kementerian Kominfo memiliki tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang kuat atas kepercayaan negara dalam mewujudkan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika, baik dari hulu hingga hilir di seluruh wilayah tanah air.

Dalam menerjemahkan misi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju, Menkominfo menilai ekosistem Kementerian Kominfo beserta mitra kerja yang terkait akan sepenuhnya bekerja dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas pemerintahan berbasis digital yang lebih baik, memegang tanggung jawab yang tinggi dan sepenuhnya menghasilkan output yang maksimal.

Oleh karena itu, perjanjian kerja antar Pimpinan dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo memang bukanlah simbol semata. Perjanjian yang penuh tantangan itu menjadi pengikat kinerja yang dapat memperkuat kolaborasi.

Menkominfo Johnny G. Plate memiliki satu dasar pemikiran bahwa perjanjian kerja tersebut terikat dalam untung dan malang, dalam susah dan sehat. Sebagai contoh, dalam membangun hubungan rumah tangga yang baik perlu adanya perjanjian di depan penghulu, pendeta maupun pastor. Dengan kata lain, Kementerian Kominfo menjadi *leading sector* dalam menjawab transformasi digital agar tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dapat diwujudkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat kita.

Dukungan Anggaran

Menteri Johnny menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19, sektor komunikasi dan informatika menjadi penopang bagi sektor lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama pandemi pula, masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan ekosistem teknologi digital, di mana aktivitas fisik dan pertemuan secara tatap muka dibatasi agar mengurangi resiko penularan wabah. Pada saat yang bersamaan, satu-satunya pilihan terbaik adalah memanfaatkan teknologi informasi.

Guna memfasilitasi kepentingan masyarakat untuk bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital, Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 atau tepatnya lebih dari setahun pasca pandemi memberikan 5 arahan penting terkait transformasi digital. Satu dari lima arahan tersebut adalah membangun infrastruktur yang masif di seluruh wilayah tanah air. Kementerian Kominfo didukung dari sisi anggaran yang besar dan daya serap tinggi yakni 96,99% di atas target rata-rata. Tak hanya itu, juga diperlukan efektivitas dari APBN sebagai darah segar untuk perekonomian nasional yang tidak saja ditentukan oleh besarnya daya serap, tetapi sangat dituntut kecepatan.

Atas dasar itulah, Menkominfo Johnny G. Plate berharap arahan Presiden Joko Widodo terkait penyerapan anggaran dilakukan secepat-cepatnya. Karena hal itu dibutuhkan untuk memompa darah segar likuiditas dalam perekonomian nasional sebagai stimulus. Maka berdasarkan arahan Kepala Negara, Menteri Johnny meminta agar segera mempersiapkan seluruh proses dan prosedur terkait dengan anggaran sehingga penyerapan dapat dilakukan lebih dini.



Pada tahun 2022 ini, dari proyeksi dan perencanaan kebutuhan anggaran lebih dari 20 triliun. Kementerian Kominfo mengusulkan 41 triliun dan diperkirakan untuk dibelanjakan sebesar 21,7 triliun, namun terdapat kekurangan pembiayaan.

Menkominfo menilai anggaran sebesar 41 triliun merupakan kebutuhan realistis yang harus disiapkan. Hal itu untuk memungkinkan kehadiran Kementerian Kominfo sebagai *enabler* yang efektif bagi transformasi digital nasional. Di samping itu, berbagai bentuk pendekatan, simulasi, dan variasi pembiayaan juga akan terus dicari untuk jalan solusi. Sebab, urgensi untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan saat terpenuhi, maka kinerja Kementerian Kominfo dituntut lebih dari prosesi penandatanganan perjanjian kerja tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo menegaskan bahwa dukungan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Kominfo perlu selaras dengan etos kerja dan hasil yang maksimal, terutama dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah tanah air. Sebuah pekerjaan besar berikut tantangan yang tidak mudah. Namun, tidak ada yang tidak mungkin jika etos kerja ditopang pula dengan semangat budaya gotong royong sebagai tim yang kuat. Niscaya, tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara dan rakyat dapat dilakukan dengan baik.



Potensial Jadi Titik Penghubung Dunia, Menteri Johnny: Optimalkan Trafik dan Utilisasi Fiber Optik Indonesia

Indonesia memiliki jaringan nasional kabel serat optik sepanjang 360 ribu kilometer melintas daratan dan lautan. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Indonesia saat ini sepanjang 115 ribu kilometer, termasuk yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 55 ribu kilometer.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan panjang kabel serat optik nasional, SKKL dan yang berada ZEE potensial menjadi penghubung jaringan telekomunikasi dari seluruh dunia

“Indonesia mau menjadi titik penghubung timur, barat, utara, selatan dalam jaringan fiber optik. Kita juga tahu Indonesia mau dihubungkan dengan Pantai Barat Amerika dan Timur melalui Indonesia. Jarak antara Pantai Barat Amerika dan titik sambung di Indonesia tidak begitu jauh untuk fiber optik hanya belasan ribu kilometer saja,” jelasnya dalam Rapat SKKL bersama operator seluler di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (04/02/2022).

Menurut Menteri Johnny, keberadaan jaringan fiber optik Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Apalagi, pengembangan potensi menjadi penghubung jaringan global memerlukan kolaborasi dan dukungan semua pihak, termasuk penyelenggara operator seluler agar trafik dan utilisasi *backbone* fiber optik Indonesia dapat berfungsi dengan baik.

“Demikian pula dari selatan ke utara, kalau kita lihat peta-nya baik yang terhubung lewat jalur lautan Hindia dihubungkan ke Singapura, atau melalui Guam (wilayah di bagian Barat Samudera Pasifik) dihubungkan ke Tokyo ataukah melalui Indonesia,” jelasnya.

Menkominfo berharap setiap pemangku kepentingan terus meningkatkan kolaborasi dan mendukung kepentingan nasional dengan menerapkan tata kelola dengan baik.

“Mari kita berpikir bersama sebagai entitas nasional, sebagai perusahaannya di Indonesia yang tidak menutup diri terhadap mitra kerja asing. Nanti kalau melalui Indonesia, bagaimana tata kelolanya dilakukan dengan baik karena ini terkait dengan yurisdiksi nasional dan terkait dengan kepentingan nasional,” ungkapnya.



Kualitas Layanan

Menteri Johnny menyatakan Indonesia merupakan wilayah *Ring of Fire* yang terdiri atas gunung berapi di darat maupun di laut. Menurutnya, jaringan kabel serat optik beberapa kali mengalami kerusakan akibat erupsi gunung yang meletus di darat dan bawah laut.

“Karena apa? Aktivitas vulkanis bawah laut. Sehingga pada saat menata kelola ini harus memperhatikan juga bagaimana peta vulkanologi di darat dan di laut. Bukan hanya peta hidrologi tapi juga peta vulkanologi. Atau bagaimana cara mengaturnya sehingga tidak mengganggu *backbone* telekomunikasi dan tidak menghambat transformasi digital,” tegasnya.

Menkominfo menyontohkan gangguan jaringan *backbone* telekomunikasi akibat cuaca dan kejadian khusus. Seperti peristiwa kabel bawah laut di wilayah Papua putus karena cuaca buruk dan mengakibatkan gangguan telekomunikasi.

“Selain itu, kabel fiber optik di perairan Kepulauan Riau juga pernah putus karena terkena jangkar kapal,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, saat kejadian gangguan jaringan fiber optik dan jaringan telekomunikasi ia sigap menerima berbagai aduan layanan telekomunikasi. Menkominfo menilai hal itu sebagai bagian dari tuntutan masyarakat akan layanan telekomunikasi yang baik dan berkualitas.

“*Handphone* saya tidak ada berhentinya ditelepon, gara-gara PeduliLindungi macet, misalnya. Dengan segala macam komentar di sosial media. Itu berarti masyarakat semuanya berharap layanan yang baik dan untuk memastikan layanan yang baik dalam satu jaringan,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan upaya mengatasi tantangan tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kelompok atau perusahaan tertentu. Menurutnya dalam satu jaringan fiber optik yang saling terhubung membutuhkan kerja bersama dalam memberikan layanan.

“Pertemuan hari ini yang saya ingin dengar dan saya mau membantu sebagai regulator, sekaligus mau membantu agar aspirasinya bisa disampaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu rencana besar Presiden, semuanya ingin untuk melancarkan kepentingan nasional, aturan-aturan dibuat untuk melancarkan itu,” tegasnya.

Mengenai regulasi di Indonesia, saat ini sudah ada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Menteri Johnny berharap pertemuan dengan penyelenggara operator seluler dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif. Hal itu diperlukan agar setiap keputusan yang diambil sebagai terjemahan dari kebijakan atau keputusan pemerintah agar bisa dilaksanakan dengan baik.



“Harapannya melalui rapat ini menjadi konsen kita sebagai satu kesatuan penyelenggara telekomunikasi nasional termasuk fiber optik, termasuk SKKL di dalamnya. Karena kita tidak hanya berbicara SKKL saja dan SKKL harus terhubung dengan yang di darat,” tandasnya.

Menkominfo mengharapkan kolaborasi dan kerja sama dalam penataan SKKL akan dapat mendukung akselerasi transformasi digital. Oleh karena itu, berkaitan dengan implikasi bisnis, komersial, maupun teknis Menkominfo berharap seluruh pihak dapat ikut memberikan pertimbangan.

“Sehingga keputusan penataan nanti bisa berfungsi dan bermanfaat bagi kita sekalian untuk mendukung pengembangan usaha korporasi, yang ujungnya untuk mendukung transformasi digital nasional kita,” ungkapny.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail. Turut hadir pimpinan penyelenggara layanan telekomunikasi dari PT Indosat Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia International. Kemudian, PT Jejaring Mitra Persada, PT Mora Telematika Indonesia, PT LEN Telekomunikasi Indonesia, PT NAP Info Lintas Nusa, PT Palapa Ring Barat, PT Palapa Timur Telematika, PT Super Sistem Ultima, PT Mega Akses Persada, dan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara.





Kominfo Harapkan Implementasi 5G Mulai Merata Tahun 2025

Pemerintah dan penyelenggara operator seluler telah mengimplementasikan teknologi 5G secara komersial sejak tahun 2021. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail mengharapakan implementasi jaringan telekomunikasi 5G akan merata pada tahun 2025.

“Pemerintah menelaah pengalaman dari implementasi 4G membutuhkan waktu sekitar enam sampai tujuh tahun yang terus berkembang di Indonesia hingga saat ini. Maka 5G tentu kita harapkan akan bisa lebih cepat dari itu, waktunya sejak diimplementasikan tahun 2021. Kita harapkan 2024 sampai 2025 sudah bisa meluas dan merata seperti halnya kondisi 4G seperti sekarang,” tuturnya dalam Webinar *Road to Indonesia 5G Security Readiness* yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Senin (07/02/2022).

Dirjen Ismail menekankan kata kunci dari dimulainya penggunaan 5G adalah tepat waktu dan tepat sasaran. “Kata kuncinya adalah *in time*, tepat waktu dan tepat sasaran yang selalu menjadi isu dan pembahasan, baik dari kementerian atau pemerintah dan regulator dengan para operator,” tandasnya.

Menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, jika implementasi 5G dalam waktu cepat artinya kemungkinan besar Indonesia akan menanggung biaya *learning* dari sebuah teknologi 5G. Namun demikian, sebaliknya jika terlalu lambat hanya akan menjadi pasar untuk tidak bisa ikut serta dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Jadi implementasi 5G ini merupakan sebuah keniscayaan, tapi harus kita atur ritme dan *timing*-nya agar implementasinya benar-benar produktif buat kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

Menurut Dirjen Ismail, menandai implementasi teknologi 5G pada tahun 2021 ditandai ketika tiga operator besar di Indonesia yakni Telkomsel, Indosat XL Axiata telah menyatakan komersial dan sudah membangun di beberapa kota di dalam bentuk *spot area*.

“Tapi kita tentu belum cukup puas dalam kondisi seperti ini, masih banyak tantangan-tantangan yang harus dikembangkan lagi agar implementasi 5G bisa berkembang sangat cepat atau lebih cepat dari yang kita harapkan,” tandasnya.

Evolusi

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo menjelaskan jaringan telekomunikasi 5G merupakan evolusi teknologi dan menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga di era transformasi digital tidak ada yang bisa membendung perkembangan dari teknologi 5G itu sendiri.

“Perkembangan teknologi, apalagi yang sudah bersifat global seperti 5G tentu akan hadir ke semua negara termasuk di Indonesia. Posisi kita juga sangat jelas bahwa 5G adalah salah satu alternatif solusi untuk meng-*enhance* dan mempercepat proses transformasi digital di Indonesia,” tuturnya.

Dibandingkan generasi teknologi sebelumnya, Dirjen Ismail menilai perkembangan 5G memberikan nuansa yang berbeda. Ia menyontohkan ketika Indonesia bermigrasi dari teknologi 3G ke 4G, sebagian besar isu hanya persoalan kecepatan.

“Jadi isu kita yang paling dominan ketika kita berpindah dari 3G ke 4G itu adalah melakukan peningkatan *user experience*, meningkatkan kecepatan transformasi informasi data atau koneksi melalui internet menggunakan teknologi *mobile broadband*. Tapi perkembangan dari 4G ke 5G agak berbeda, karena 5G memberikan nuansa yang lebih luas dari sekadar masalah *user experience*,” jelasnya.

Menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, teknologi 5G memiliki banyak keunggulan selain menyoal kecepatan data, seperti mengenai kecepatan transformasi informasi dengan latensi yang sangat rendah.

“5G juga mampu meng-*handle devices* dalam jumlah yang sangat besar dan kemampuan-kemampuan dari 5G ini yang membuat nuansa perkembangan 4G menjadi 5G menjadi lebih luas dari sekedar persoalan *user experience*. Di sini, ada persoalan-persoalan atau *opportunity-opportunity* yang ada dalam hal ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan latensi yang rendah tadi,” jelasnya.

Selain kecepatan tinggi dan latensi yang rendah, 5G juga akan mendorong banyaknya pengguna baru dari hanya sekedar *use case connectivity* melalui *mobile broadband*, termasuk kemampuan untuk menangani perangkat dalam jumlah besar.

“Oleh karena itu, ini membuat pilihan-pilihan *use case* dalam 5G menjadi sangat beragam. Jadi ada pilihan untuk *smart city* misalnya, yang memberikan kemampuan untuk meng-*handle device* dengan sangat luas atau misalnya *autonomous vehicle*. Kita bisa memberikan layanan-layanan baru yang critical terhadap waktu, terhadap *delay time* dan mobil tanpa supir, tanpa awak dan sebagainya,” papar Dirjen Ismail.

Manfaat lain teknologi 5G yang telah menjadi isu saat ini adalah penggunaan *Virtual Reality* dan *Augmented Reality* yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk *Metaverse*. Perkembangan teknologi baru itu menyesuaikan dengan perkembangan 5G. Oeh karena itu, implementasi 5G menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo harus dipersiapkan dengan baik.

“5G di Indonesia ini memang merupakan salah satu alternatif teknologi yang perlu kita persiapkan dengan baik. Kita tidak ingin datang atau mengimplementasikan 5G pada saat kondisi negara kita belum siap, tapi kita juga tidak ingin tertinggal dari penerapan 5G secara meluas yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan di banyak negara maju,” jelasnya.

Selain Dirjen SDPPI Ismail, hadir Co-Chair OIC Cert 5G Security Working Group, Aloysius Cheang; Direktur Standardisasi Perangkat Informatika Kementerian Kominfo, Mulyadi; Direktur Kebijakan Teknologi Kamsibersan BSSN, Soetedjo Joewono; VP Network Infrastructure and Security Operation Telkomsel, Rahmat Novalianto; dan Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum.



Menkominfo Harapkan Kebebasan Pers Mampu Jaga Humanisme Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak jurnalis merefleksikan perjalanan pers Indonesia. Menurutnya, di era digital, pers tetap memiliki peran dasar mengawal kehidupan berbangsa yang cerdas dan bermartabat. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong pers untuk menyajikan konten berkualitas yang memberdayakan dan menjaga humanisme masyarakat.

“Peran strategis pers akan tetap relevan dari masa ke masa. Bahkan di era digital sekarang pers senantiasa menjalankan fungsi yang sangat kritis, fungsi korektif mewujudkan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, kehidupan negara yang lebih inklusif, yang lebih demokratis, dan tentu yang lebih visioner untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita,” ungkap Johnny dalam Diskusi The Editor’s Talks yang berlangsung secara hibrida dari Jakarta Selatan, Selasa (08/02/2022).

Sebagai pilar keempat demokrasi setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif, Menteri Johnny mengingatkan mengenai peran pers sebagai pengontrol atas tiga pilar tersebut.

“Jadi Ibu Ketua Komisi I DPR RI (Meutya Viada Hafid), kita memang dikontrol oleh pers dan pers berjanji untuk mengontrol kita dan itu adalah hal yang baik adanya,” ujarnya.

Mengutip Digital News Report tahun 2021 yang dirilis Reuters Institute University of Oxford, Menkominfo menyebutkan media online termasuk media sosial menjadi sumber berita yang paling banyak diakses oleh masyarakat dengan proporsi sekitar 89%. Sementara televisi pada proporsi 58% dan media cetak 20%.

“Laporan tersebut selaras juga dengan Survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Kominfo dan Katadata *Insight Center*, dimana 73% masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang paling sering diakses. Sedangkan 59,7% responden memilih televisi dan hanya 4% responden memilih media cetak dan radio sebagai sumber informasi,” paparnya.

Berdasarkan data tersebut, Menteri Johnny mendorong pers menyajikan konten yang bisa memberdayakan dan menjaga humanisme masyarakat.

“Tidak sekadar melaporkan informasi, tetapi lebih kepada memberikan daya analisis yang kritis dan berimbang, memperluas pemikiran, serta menjaga humanisme masyarakat,” tandasnya.

Bahkan, Menkominfo mengharapkan insan pers menunjukkan karya yang berkualitas dalam menjalankan kebebasan pers.

"Pers harus mampu menunjukkan kepada masyarakat secara jelas perbedaan antara konten hasil kerja dan kinerja jurnanisme dengan konten yang bukan karya jurnalistik. Kinerja insan pers yang bebas, yang independen, dan yang bertanggungjawab perlu didukung oleh institusi bisnis yang menaunginya," ungkapnya.

Indeks Kebebasan Meningkat

Sejarah mencatat adanya pembatasan terhadap kebebasan pers di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun, Menteri Johnny menegaskan semua pembatasan kebebasan pers itu hanya menghasilkan situasi yang kontraproduktif bagi perkembangan bangsa.

"Alih-alih menghasilkan kestabilan, alih-alih menghasilkan kemapanan. Justru menumbuhkan otoritarianisme yang pada akhirnya menimbulkan chaos, disharmoni bahkan disintegrasi," tuturnya.

Mengutip indeks kebebasan pers yang dirilis Reporters Without Borders tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 113 dari 180 negara. Posisi itu, menurut Menkominfo meningkat signifikan dari urutan 139 pada tahun 2013.

"Sedangkan secara nasional, indeks kemerdekaan pers Indonesia mencapai skor 76,02 di tahun 2021 dengan kata lain meningkat 0,75 poin dibandingkan tahun 2020 dengan skor 75,27," jelasnya.

Menkominfo menyatakan tantangan yang dihadapi insan pers tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam pers sendiri.

"Seiring dinamika masyarakat, tantangan yang dihadapi oleh pers pun muncul secara dinamis dan tantangan terbesar saat ini tidak hanya berasal dari faktor atau sisi eksternal pers namun juga dari dalam pers itu sendiri," tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, tantangan yang perlu juga dihadapi saat ini adalah semakin sulitnya menegakkan jurnanisme berkualitas.

"Industrialisasi dan komersialisasi yang melanda pers ditambah tuntutan pers untuk beradaptasi dengan akselerasi teknologi informasi dan komunikasi membuat pers mengalami kecanggungan," ujarnya.

Tantangan lain, khususnya yang menjadi perhatian media konvensional adalah berkembangnya media baru, *the new e-commerce over the top* dan fenomena media sosial yang sarat dengan *click bait*, hoaks, hingga infodemi. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong iklim pers yang sehat dan berkualitas menjadi penting untuk terus dijaga dan ditumbuhkembangkan.

"Kondisi pers yang sehat tentu berdampak pada kualitas berita yang disebarluaskan kepada masyarakat, informasi-informasi yang berbasis data yang aktual, yang faktual, dan tentunya juga yang bertanggung jawab," tegasnya.

Selain Menteri Johnny, diskusi bertajuk Membangun Jurnanisme Berkualitas di Era Revolusi Teknologi Informasi turut dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Pengamat Media Ignatius Haryanto dan Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Kemal Gani.





Kembangkan Identitas Digital, Kominfo Terapkan Tiga Langkah

Inovasi dalam layanan digital telah menjadi salah satu pendorong kemajuan ekosistem digital nasional. Sejalan dengan dinamika ekonomi digital, kini diperlukan identitas digital untuk mendukung pengembangan ekosistem digital Indonesia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A. Pangerapan menyatakan tengah menyiapkan tiga langkah dalam mendukung pengembangan identitas digital Indonesia ke depan.

"Identitas digital menjadi sebuah keniscayaan yang patut untuk direalisasikan. Kominfo melakukan pengembangan melalui kerangka regulasi, membangun ekosistem teknologi, serta penguatan talenta digital," ujarnya dalam Webinar Pentingnya Digital Trust dalam Perspektif Outlook Ekonomi Digital Indonesia, dari Jakarta Pusat, Rabu (02/02/2022).

Mewakili Menkominfo Johnny G Plate dalam webinar itu, Dirjen Samuel menyatakan dari aspek regulasi, yang sudah berjalan, Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

"Khususnya mewajibkan pengguna tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi. Karenanya, saya ingin mendorong juga supaya layanan tentang otorisasi ini bisa dilaksanakan oleh orang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018," jelasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan saat ini tengah mempersiapkan perubahan Peraturan Menteri Kominfo No 11/2018. "Saat ini sedang kami siapkan perubahan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yang mengatur bahwa sistemnya menggunakan single root dan saat ini dilaksanakan oleh Kominfo," ujarnya.

Menurut Dirjen Samuel, sejak Tahun 2018 Kominfo telah menjadi pengoperasi atau penanggung jawab terhadap sistem root ini.

"Kami diaudit juga sama seperti teman-teman PSrE. Seperti kita ketahui, setiap dua tahun itu harus dilakukan audit PSrE untuk memastikan tetap *comply* terhadap peraturan-peraturan atau standar acuan yang ada," jelasnya.

Untuk langkah pengembangan kedua, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur teknologi yang berfokus pada digital trust. Dan langkah ketiga, Kementerian Kominfo melakukan penguatan talenta digital agar mengenal konsep dan manfaat identitas digital.

"Kami juga berupaya meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, khususnya memberikan pemahaman pentingnya melindungi data pribadi," ujar Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Kebutuhan Meningkat

Dirjen Samuel menyatakan seluruh inovasi digital perlu terus didorong. Apalagi selama pandemi Covid-19, terdapat 21 juta pengguna baru layanan digital di tahun 2021 lalu berdasarkan data kajian dari Google, Temasek, Bain & Co.

"Artinya, masyarakat juga sudah merasakan bahwa pentingnya dapat memanfaatkan ruang digital padahal saat ini Indonesia dan negara lainnya masih mengalami masa-masa pandemi Covid-19. Dengan jumlah pengguna internet yang saat ini sudah mencapai 202,6 juta dan jumlah itu terus mengalami peningkatan yang sangat tajam," tuturnya.



Mengutip International Telecommunication Union (ITU), Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan sebuah *digital identity* adalah representasi digital dari suatu entitas sehingga dapat dibedakan di dalam suatu konteks digital.

"Identitas tersebut dapat digunakan di dalam transaksi seperti halnya melakukan pembelian barang secara online ataupun membuka akun bank, sehingga diharapkan bisa digunakan ke arah sana. Kenapa bagi Indonesia ini sangat penting? Ke depannya memang setiap orang yang beraktivitas di ruang digital itu bisa teridentifikasi," tandasnya.

Dirjen Samuel menegaskan layanan inovasi diperlukan untuk memastikan lisensi daripada keamanan individu bagi orang yang bertransaksi ataupun yang berjualan.

"Hadirnya sertifikasi ya untuk itu. Seperti contohnya Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang merupakan penanda bukti keabsahan bagi layanan inovasi digital untuk berikutnya dapat digunakan dalam identifikasi dokumen, transaksi, penerbitan identitas digital, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna layanan digital," jelasnya

Selama pandemi, menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, sektor telekomunikasi mengalami peningkatan karena memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menyatakan pihaknya sedang mengupayakan juga pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Kalau kita sudah menyatakan diri kita berada di ruang digital, bagaimana pelindungannya? Bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan data pribadi tadi itu sesuai dengan peruntukannya?" ungkapanya.

Dirjen Samuel menegaskan, hal yang wajib dilakukan ketika seseorang berada di ruang digital yakni membangun *trust* (kepercayaan) yang juga bisa dibentuk dengan keberadaan identitas digital.

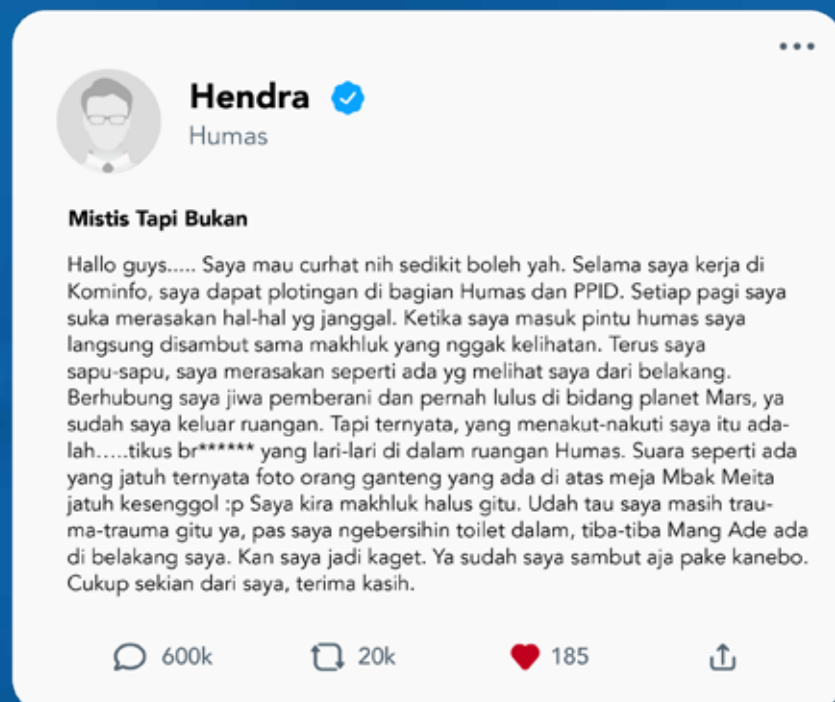
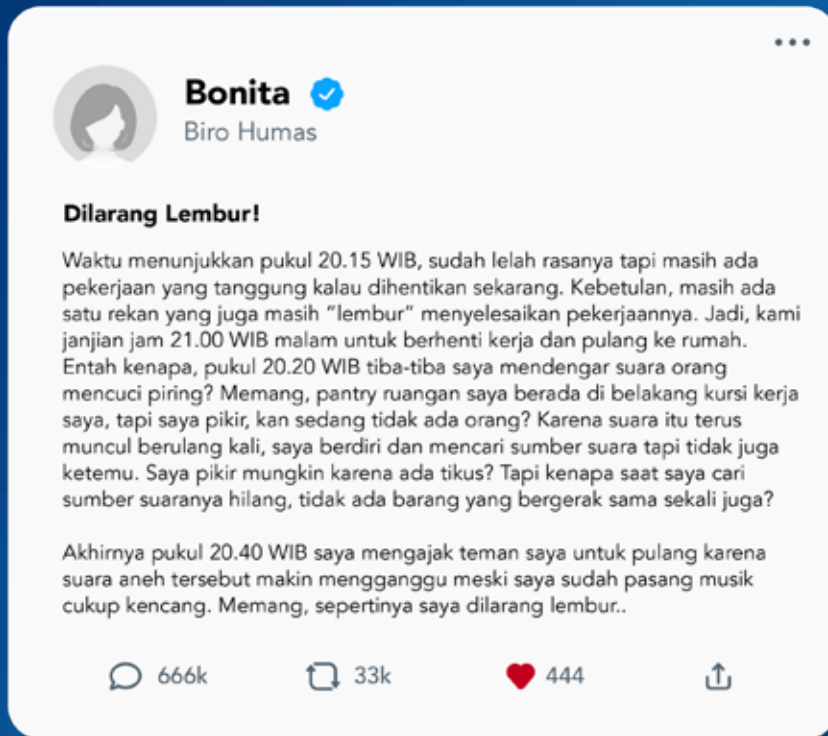
"Ini memang sangat dibutuhkan karena ketika kita masuk ke ruang digital) karena rumus dari ruang digital, itu harus membangun *trust* (kepercayaan). Apa yang kamu lihat, dengar, dan baca, tidak bisa dipercaya sampai sumbernya bisa dipercaya termasuk penggunaanya," ungkapanya.

Oleh karena itu, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo mengingatkan agar tidak mudah memberikan data pribadi apalagi identitas digital. Menurutnya hal itu akan dapat menghindarkan penyalahgunaan identitas digital.

"Kita tidak perlu memberikan data-data pribadi secara menyeluruh. Kita bisa saja memberikan *digital identity* dari salah satu penyelenggara dan mereka lah yang melakukan verifikasi bahwa benar ini adalah identitasnya Pak Semmy, tidak perlu saya setiap kali masuk ke ruang digital mengisi data pribadi saya," tandasnya.

Selain Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, hadir pula sebagai pembicara antara lain Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2013-2014, Muhamad Chatib Basri; CEO & Co-Founder VIDA, Sati Rasuanto; Ekonom & Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira; serta CEO & Co-Founder DANA Vincent Henry Iswaratioso.






 minfo

Padme ✓

Setjen

Meja yang sudah tidak bundar

Biasanya, apapun kami lakukan bertiga. Sarapan bertiga, julid bertiga, bahkan paralayang pun bertiga. Sekarang, setiap aku jalan hanya berdua, aku selalu ingat kamu di sebelah kananku. Waktu itu aku menangis perih sekali selama 3 hari. Aku berharap bisa duduk minum kopi denganmu lagi. Kamu tahu? Aku kalau marah pasti akan menjadi mendadak bisu tiap diajak bicara. Menganggap orang itu tembok. Anehnya, tidak pernah bisa kulakukan kepadamu. Seakan-akan kamu adalah titik lemahku. Aku yang terlalu buta dan lemah setiap menyayangi seseorang, termasuk pada temanku sendiri. Di dalam setiap tundukkan, aku selalu berdoa kalau pria-mu tidak akan melukaimu lagi. Pernah sedekat nadi, walau sekarang sejauh matahari. Tapi, aku ingin kamu sadar bahwa aku akan selalu menjadi temanmu di sini-

444k

22k

666


SF ✓

Ditjen IKP

Surat untuk (TU) Dirjen

Awal orientasi CPNS dulu tuh inget banget, salah satu pesen dari Pak Sekjen adalah "hafalin muka bos-bos kalian supaya kalo ketemu bisa nyapa sopan gitu, misal kalo ketemu di lift." Ya tapi namanya juga anak durhaka, jadi cuek aja dengernya, sambil mikir, "Siapa gue rakyat jelata ini ketemu bos." Peluangnya minim lah ya.

Emang dasar nggak boleh takabur ya bund. Suatu hari, sebagai anak bontot di Subdit, gue disuruh nganter surat buat ditandatangani Eselon 1. Gue berdua temen cuss lah ke ruangan beliau. Eh, meja sekretarisnya kosong. Tapi ada satu bapak-bapak tuh lagi duduk di meja baca koran. Gue mikir, "oh staf TU nih. Titip aja kali ya daripada nunggu sekretaris bapake yang gatau nongol kapan." Yaudah tuh, gue sambil nunduk-nunduk sopan bilang, "permisi pak, ini saya mau minta tanda tangan Pak Dirjen." Bapake cuma senyum sambil ambil map gue.

Pas gue balik badan, temen gue kaya ngawe-ngawe gitu tangannya sambil nyuruh gue buru-buru ke arah dia. Gue agak lari nyamperin dia, abis itu kita buru-buru keluar ruangan. Gue nanya, "ngapa kau mundur-mundur pas gue ngasi surat trus manggil diriku?" Dia lalu bilang, "Kak monmaap, itu tadi yg lo kasih mapnya Pak Dirjennya langsung kak!" Gue antara mau jedot-jedotin kepala sama takut tuh surat langsung dibakar. Tapi, nggak kok. Suratnya aman karena diriku masih ada di kantor ini dan tidak dipecat. Sekian dan hafalkan wajah bosmu.

756k

48k

251





Dirjen SDPPI Resmikan 6 Kantor UPT, Terobosan Harus Tuntas

Jakarta (SDPP) – Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail mengajak seluruh jajarannya inovatif dan kreatif. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ditjen SDPPI harus bekerja dan merancang program yang bersifat terobosan untuk kebaikan instansi.

“Jangan berorientasi kepada proses lagi, bila tidak ada *output*-nya, percuma. Ketika merancang sesuatu itu harus sampai tuntas. Inovasi dan kreativitas diperlukan demi mengikuti perubahan zaman,” katanya dalam sambutan pada Peresmian Pembangunan Enam Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor SFR di sejumlah wilayah, Rabu (2/2/2022).

Keenam UPT yang telah melakukan pembangunan dan perluasan gedung adalah Balai Monitor Kelas I Makassar, Balai Monitor Kelas I Medan, Balai Monitor Kelas I Samarinda, Balai Monitor Kelas II Batam, Balai Monitor Kelas II Padang, dan Balai Monitor Kelas II Merauke.



Kemkominfo Komitmen Berikan Dukungan Teknis Pengembangan SP4N-LAPOR!

Jakarta, Ditjen Aptika – Kemkominfo melalui Ditjen Aptika berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

“Dukungan melalui teknologi informasi pengembangan dan implementasi SP4N-LAPOR! mencakup infrastruktur, pengoperasian, pemeliharaan, pengembangan aplikasi, pedoman teknis, *helpdesk* teknis, aplikasi penunjang, pendamping dan pedoman integrasi, pengoptimalisasian diseminasi informasi SP4N-LAPOR! guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan dalam acara penandatanganan PKS Sinergi SP4N-LAPOR! yang diadakan secara daring, Rabu (09/02/2022).

Seminar Indeks Pengelolaan dan Komunikasi Publik 2021

Bogor, Kominfo – Dinamika teknologi informasi dan komunikasi yang memicu disrupsi menantang pengelola informasi dan komunikasi publik di lembaga pemerintah untuk berkomunikasi kepada publik secara adaptif.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menyatakan di tengah variasi lanskap komunikasi publik lembaga pemerintah, aktivitas komunikasi publik perlu diukur secara obyektif agar dapat diketahui dampak dan manfaat bagi publik. “Kemajuan TIK yang penuh disrupsi memicu tantangan terjadinya disinformasi. Kondisi itu memaksa pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah harus segera disesuaikan



sehingga menjadi lebih adaptif dan efektif sesuai dengan lanskap yang baru,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, dalam Seminar Indeks Pengelolaan dan Komunikasi Publik 2021 di Bogor, Senin (31/1/2022).

Workshop Jurnalistik Online Empat Kota: Wartawan Bisa Apa di Era Digital

Surakarta, Senin (07/02/2022) – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari setiap tahunnya, Monumen Pers Nasional menggelar Workshop Jurnalistik bertema “Wartawan Bisa Apa di Era Digital?” pada Senin, 7 Februari 2022 di empat kota. Acara yang diikuti oleh 1000 peserta ini berlangsung secara bersamaan (daring dan luring) di kota Surakarta (Monumen Pers Nasional), Yogyakarta (Sekolah Vokasi UGM), Jakarta (London School of Public Relations), dan Kendari (IAIN Kendari) mulai pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.

Monumen Pers Nasional mengambil tema “Wartawan Bisa Apa di Era Digital?” berangkat dari pesatnya kemajuan teknologi saat ini yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Kemajuan teknologi tersebut membuat industri pers harus beradaptasi dengan cepat, kreatif dan proaktif. Workshop Jurnalistik “Wartawan Bisa Apa di Era Digital?” ini bermaksud untuk memperkaya wawasan dan keterampilan para mahasiswa dan insan pers terutama kaum muda dalam bidang jurnalistik dan literasi digital.

Direktur LAIP: Smart City bukan Soal Belanja Teknologi tapi Master Plan yang Tepat

Pengembangan kota cerdas atau *smart city* tidak semata-mata terkait belanja teknologi berbiaya besar. Hal itu bisa disiasati dengan konsep terbuka yang melibatkan banyak pihak untuk membantu pendanaan maupun sumber daya manusia.

“Saya khawatir kita terjebak pada euforia *e-government* yang mendahulukan belanja teknologi. *Smart city* jangan dijawab dengan belanja teknologi, melainkan melalui konsep atau *master plan* yang tepat,” kata Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Bambang Dwi Anggono saat seminar daring bertema Tantangan dan Peluang Pengembangan Smart City Pasca Pandemi, Rabu (9/2/22).

Dalam menyusun *master plan* itu, lanjut Bambang, pemerintah daerah harus terbuka dengan berbagai komunitas yang ada, misalnya dunia usaha dan akademisi. Mereka memiliki dukungan sumber daya sebagai bagian dari solusi.



Balitbang SDM - Pemkot Depok Bahas Kerjasama Pengembangan SDM

Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung transformasi digital Indonesia pada tanggal 10 Januari 2022 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Hary Budiarto, membahas Program Digital Talent Scholarship (DTS) yakni program pelatihan pengembangan kompetensi yang telah diberikan kepada masyarakat sejak tahun 2018. Program DTS di tahun 2021 yang lalu secara garis besar dibagi menjadi delapan akademi, yaitu VSGA, TSA, FGA, PRO-A, GTA, DLA, DEA, dan TA. Dalam sesi diskusi, dibahas rangkaian rencana kegiatan pelatihan untuk pemerintah Kota Depok, dengan kuota peserta yang diajukan sebanyak 2.000 peserta yang ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum.



Sukseskan MotoGP, Kemkominfo Terbitkan ISR Sementara dan 5G Experience

Mandalika (SDPPI) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengeluarkan Izin Stasiun Radio (ISR) Sementara dan rekomendasi penggunaan perangkat telekomunikasi mendukung kelancaran pelaksanaan Pramusim MotoGP 2020, 11 hingga 13 Februari 2022 di Mandalika International Street Circuit.

"ISR Sementara dan surat rekomendasi penggunaan perangkat frekuensi radio akan digunakan untuk komunikasi radio penyelenggara selama event berlangsung," jelas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo Ismail, di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/02/2022).

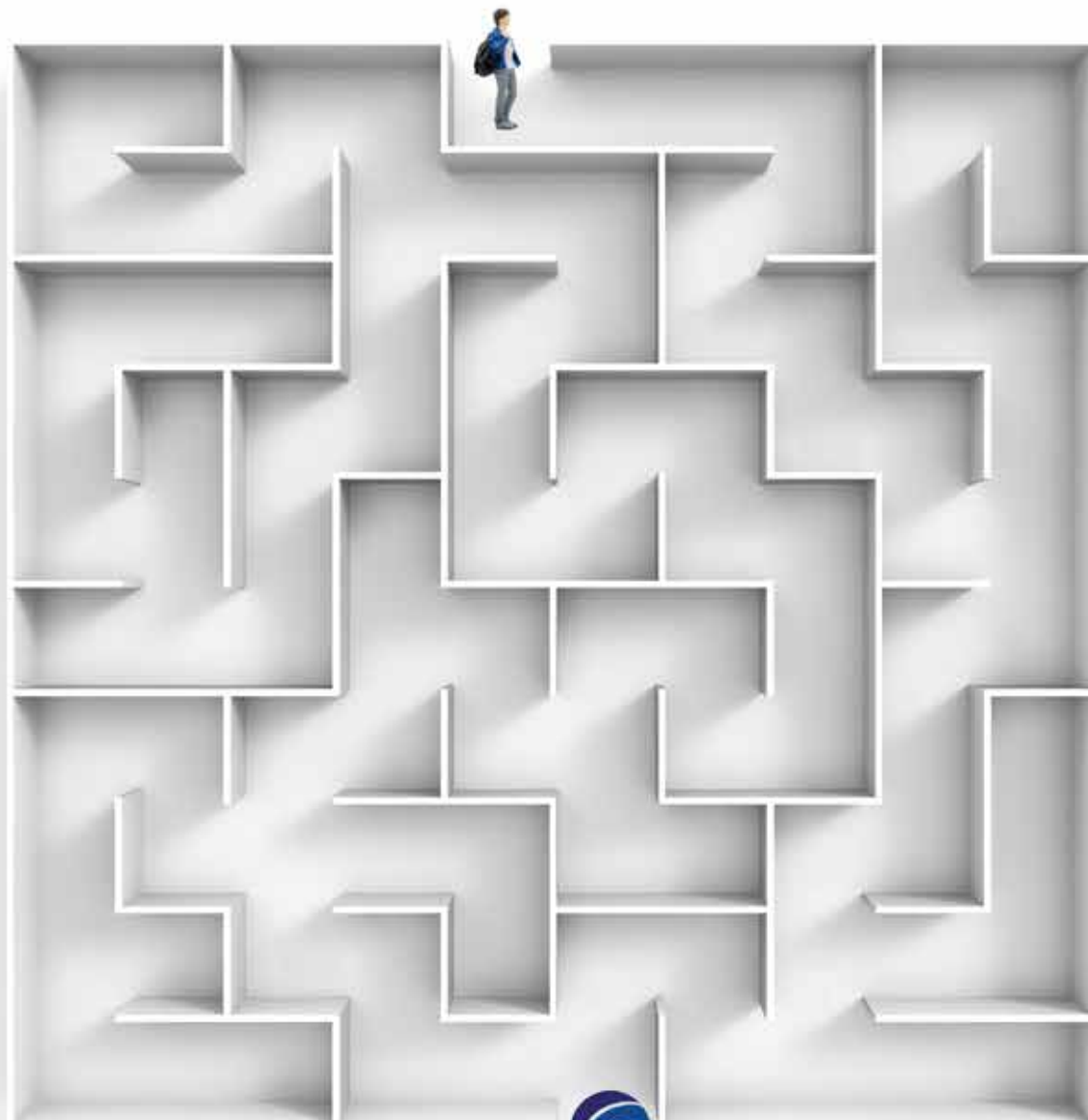
Izin penggunaan pita frekuensi 26 GHz untuk Showcase 5G dihadirkan operator seluler sebagai 5G Experience bagi pengunjung. "Salah satunya untuk Telkomsel. Tujuannya agar masyarakat merasakan langsung beragam use case 5G yang nantinya disediakan oleh operator seluler, antara lain berupa use case VR Driving dan Robot 5G di Sirkuit Mandalika," jelasnya.



Pelantikan PNS Angkatan 2019 Kementerian Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong peningkatan kompetensi empat pilar literasi digital bagi 124 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru saja dilantik dari formasi umum maupun dari STAN. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo, Imam Suwandi menyatakan, seluruh PNS Kominfo merupakan ASN Digital yang wajib memiliki dan memahami empat pilar literasi digital yaitu *digital skill*, *digital safety*, *digital culture* dan *digital ethics*.

"Dengan empat pilar literasi digital tersebut, PNS lebih *open mind*, *open heart* dan *open will* serta menjadi *problem solver* di masing-masing satuan kerja sehingga akan merubah budaya kerja yang ada saat ini yang sebelumnya reaktif menjadi proaktif, yang sebelumnya lambat menjadi lincah (*agile*)," ujarnya dalam Pelantikan PNS Angkatan 2019 Kementerian Kominfo, di Jakarta Pusat, Selasa (18/01/2022).



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment



LOH
NGAPAIN
DI SINI
BAR?

GUE ADA
INFO
TERUPDATE
RUD..

GUE DAPET INFO
KATANYA SI COVID INI
DISEBAR PAKAI
CHEMTRAILS LHO!



HOOO...
ITUKAN UDAH
DI KLARIFIKASI
TNI-AU & KOMINFO
ITU TUH
CUMAN JEJAK
KONDENSASI
PESAWAT KOK.



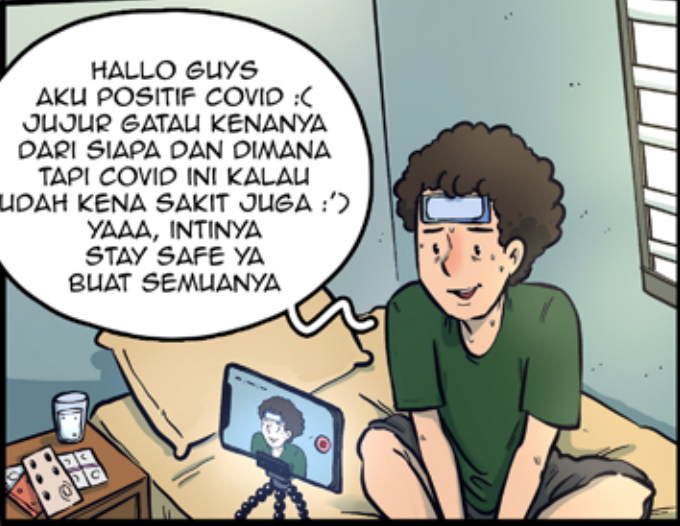
YAYAYA
TERSERAH DEH LU
MAU PERCAYA
APA ENGGAK,
KALAU GUE SIH
PERCAYANYA
COVID OMICRON
GAK BAHAYA..

DAH AH..
GUE MAU
LANJUT
NONGKRONG
SAMA
ANAK-ANAK,
BYE RUD

5 HARI KEMUDIAN



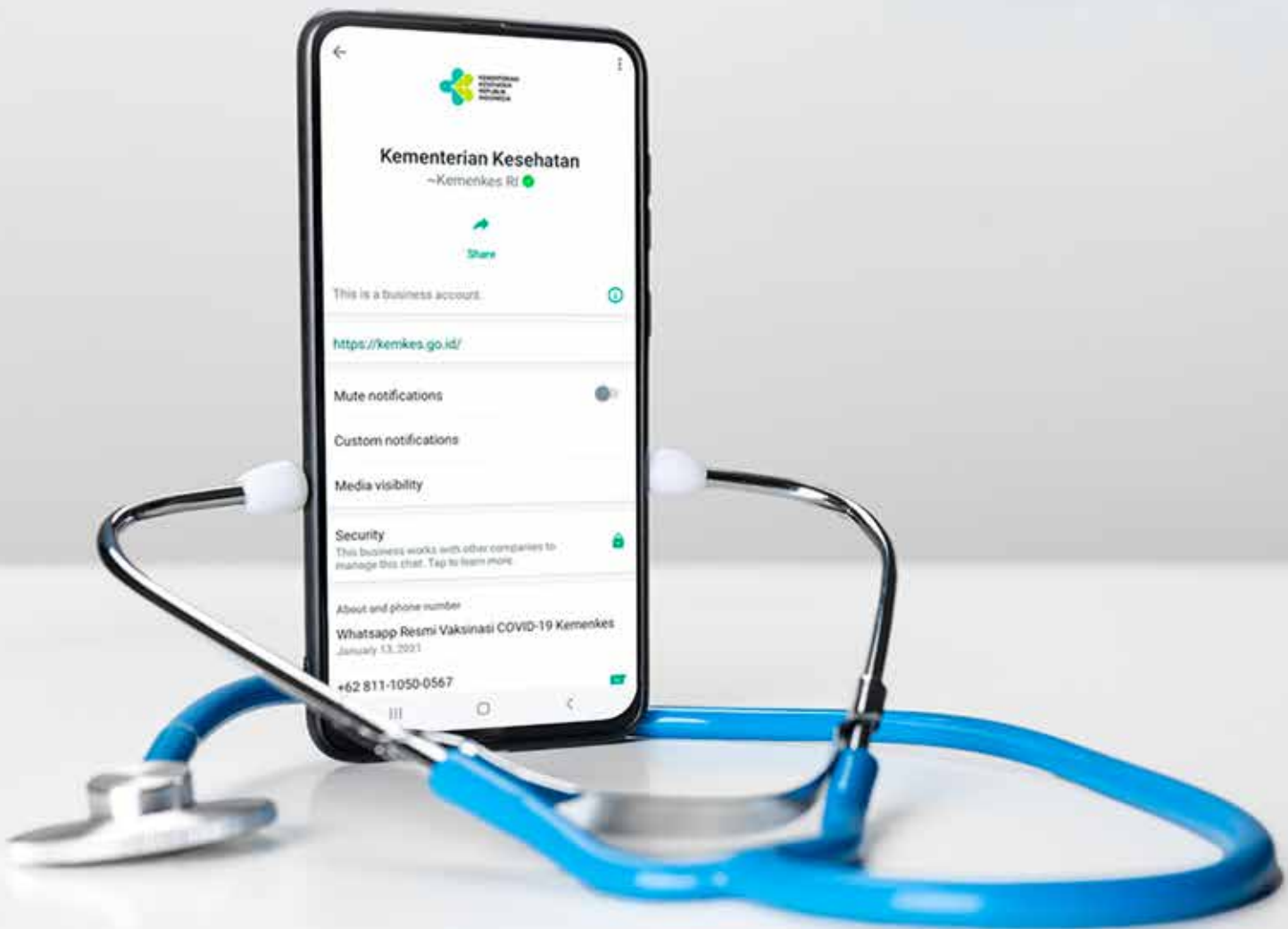
HAH?!
POSITIF
COVID?!



HALLO GUYS
AKU POSITIF COVID :(<
JUJUR GATALI KENANYA
DARI SIAPA DAN DIMANA
TAPI COVID INI KALAU
UDAH KENA SAKIT JUGA :>)
YAAA, INTINYA
STAY SAFE YA
BUAT SEMUANYA

Belum dapat WA isoman?

hubungi Whatsapp Kemenkes RI
081110500567



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110
(021)3452841
majalahkominfonext@kominfo.go.id